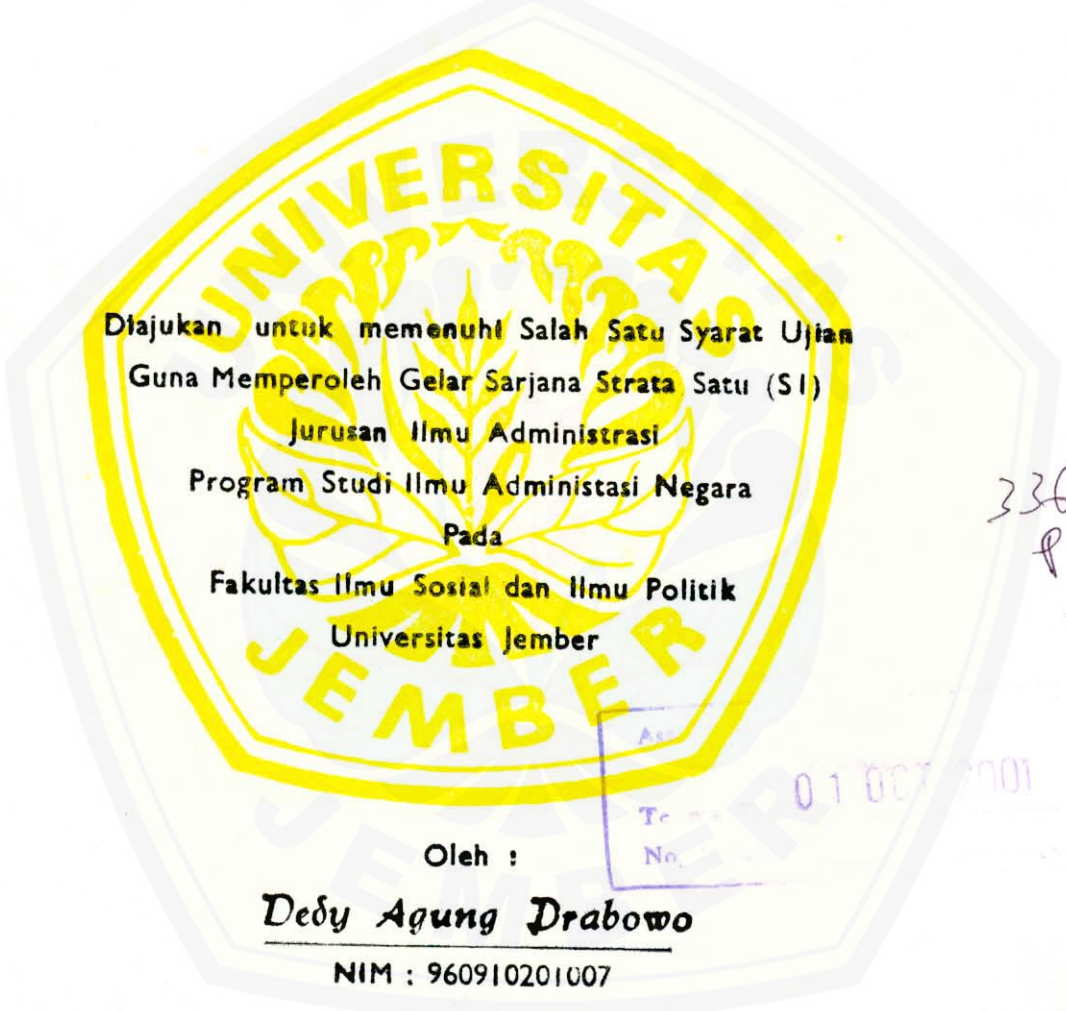




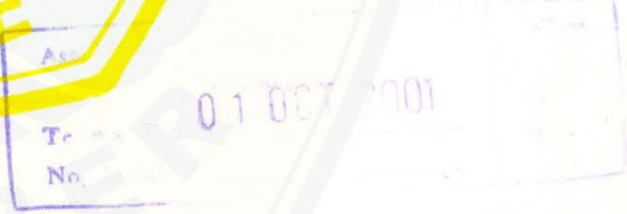
HUBUNGAN KEMAMPUAN APARAT PEMUNGUT PAJAK
DENGAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KECAMATAN RINGINREJO KABUPATEN KEDIRI

S K R I P S I



Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (SI)
Jurusan Ilmu Administrasi
Program Studi Ilmu Administasi Negara
Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

33622
PRA
h



Oleh :

Dedy Agung Drabowo

NIM : 960910201007

Pembimbing

Drs. Humaldi, SU

Asisten Pembimbing

Drs. Sutomo, Msi

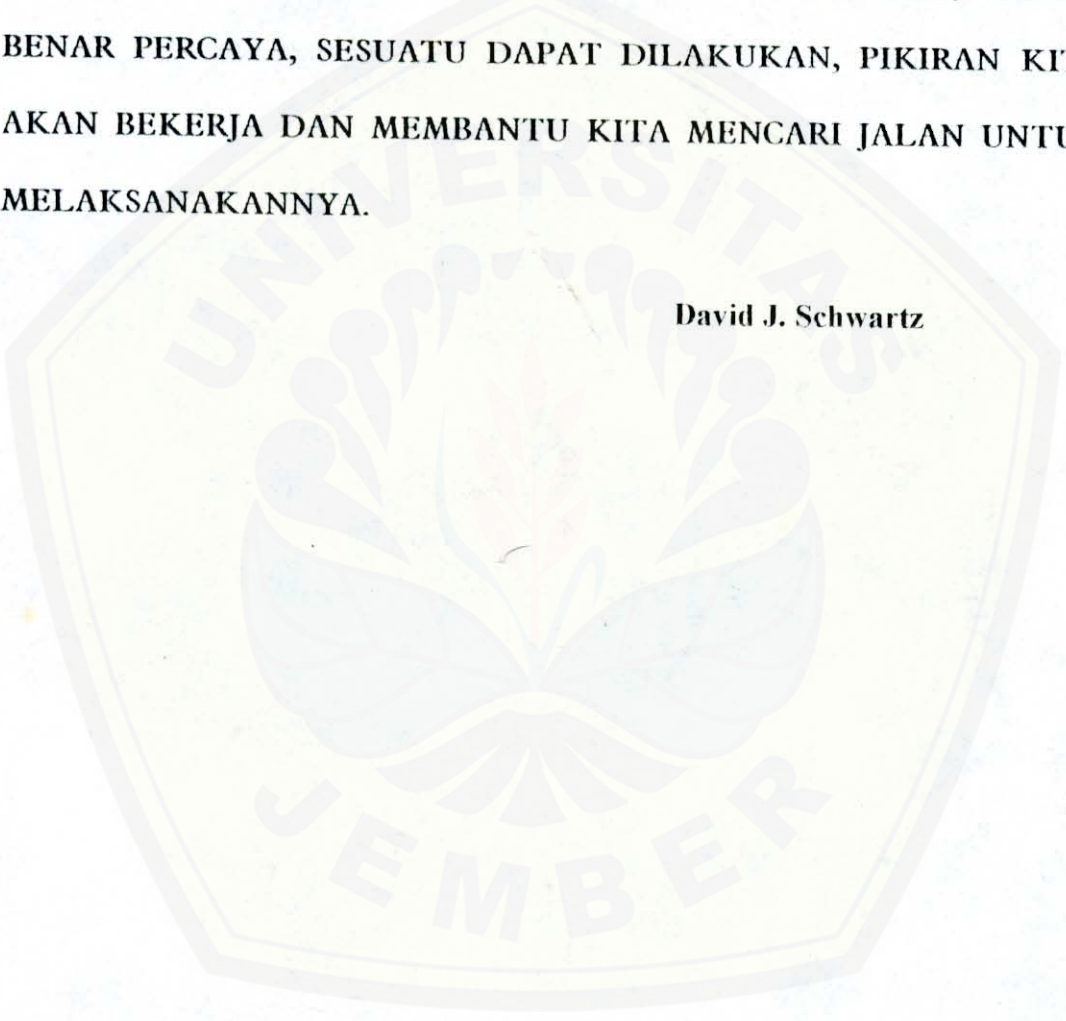
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

2001

MOTTO

JIKA KITA PERCAYA SESUATU ITU TIDAK MUNGKIN, PIKIRAN KITA AKAN BEKERJA UNTUK MEMBUKTIKAN MENGAPA HAL ITU TIDAK MUNGKIN. AKAN TETAPI JIKA KITA PERCAYA, BENAR-BENAR PERCAYA, SESUATU DAPAT DILAKUKAN, PIKIRAN KITA AKAN BEKERJA DAN MEMBANTU KITA MENCARI JALAN UNTUK MELAKSANAKANNYA.

David J. Schwartz



Kupersembahkan dengan keikhlasan dan ketulusan kepada:

- Bapak dan ibu Sudarmanto atas segala doa dan jerih payahnya, nenekku tercinta, kakakku sekalian dengan segala dukungan dan pengertiannya serta kampus tempatku berjuang.
- Daniar Putri Susanti calon pendamping hidupku kelak,
- Teman-teman UKM Bulutangkis, kalian sangat berarti.

PENGESAHAN

Diterima dan Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S1)
Jurusan Ilmu administrasi Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu sosial Ilmu Politik
Universitas Jember

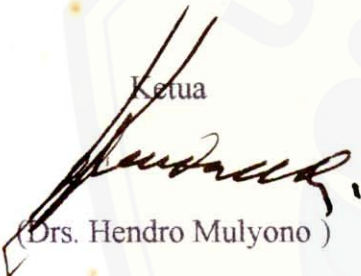
Pada

Hari/Tanggal : Sabtu/15-9-2001

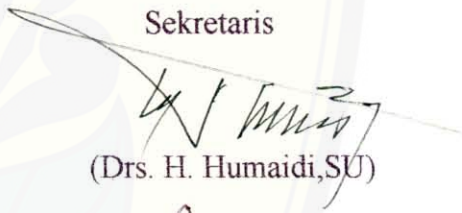
Jam : 08.00 wib

Panitia Penguji

Ketua




(Drs. Hendro Mulyono)

Sekretaris


(Drs. H. Humaidi, SU)

Anggota

1. Drs. Sutomo, Msi
2. Dra. Inti Wasiati, MM
3. Drs. Anwar, Msi


()
()

Mengetahui

Dekan

Fakultas Ilmu sosial Ilmu Politik
Universitas Jember




(Drs. M. Toerki)

NIP. 130 524 832

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul **“Hubungan kemampuan aparat pemungut pajak dengan efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan”** dengan baik. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Administrasi, Program Study Administrasi negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik bantuan langsung maupun tidak langsung. Atas bantuan yang diberikan, penulis menyampaikan terima kasih tidak terhingga kepada :

1. Bapak Drs. Humaidi, SU selaku dosen pembimbing.
2. Bapak Drs. Sutomo, Msi selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan yang diberikan.
3. Bapak Drs. H. M. Toerki, selaku dekan FISIP Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Mud'har Syarifudin, Msi, selaku Ketua Jurusan ilmu Administrasi FISIP Universitas Jember.
5. Bapak Drs. H. Budiyo, Msi, selaku Ketua Program Study ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Jember.
6. Ibu Dra. Nasikah Hadi selaku Dosen Wali penulis.
7. Bapak Suropto Utoyo, BA. selaku camat di Kec. Ringinrejo terima kasih atas ijin yang telah diberikan.
8. Seluruh pegawai kecamatan Ringinrejo
9. Seluruh Kepala desa di kecamatan Ringinrejo beserta para kepala dusun yang ada di kecamatan Ringinrejo, dan semua pihak yang telah membantu.
10. Almamaterku.

Semoga Allah memberikan berkah atas semua bantuan yang diberikan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

DAFTAR TABEL

1. Persentasi Dana perimbangan bagian daerah atas beberapa sumber penerimaan berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999.
2. Realisasi Penerimaan pajak bumi dan bangunan Tahun 1999 di wilayah kecamatan Ringinrejo Keadaan s/d tanggal 14 Maret 2000
3. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 Wilayah Kecamatan Ringinrejo keadaan s/d 14 Maret 2000.
4. Komposisi Kepala Keluarga menurut tingkat pendidikan di wilayah Kecamatan Ringinrejo.
5. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 wilayah Kecamatan Ringinrejo keadaan s/d tanggal 14 maret 2000
6. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 wilayah kecamatan Ringinrejo keadaan s/d 14 Maret 2000.
7. Komposisi aparat pemungut pajak berdasarkan status atau kedudukannya di wilayah Kecamatan Ringinrejo.
8. Komposisi aparat pemungut pajak berdasarkan tingkat pendidikan di wilayah Kecamatan Ringinrejo.
9. Komposisi aparat pemugut pajak berdasarkan lama kerja atau pengalaman kerja.
10. Frekwensi pemungutan pajak
11. Prosentase Motivasi Aparat Pemungut Pajak
12. Perbandingan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan sektor pedesaan
13. Target waktu pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kecamatan Ringinrejo periode tahun 1999/2000

14. Data score Variabel pengaruh indikator Tingkat Kemampuan Intelektual (X1)
15. Data score Variabel pengaruh indikator Tingkat Kemampuan Fisik (X2)
16. Data total score Variabel Kemampuan (X)
17. Data score variabel terpengaruh indikator Kualitas Kerja (Y1)
18. Data score variabel terpengaruh indikator Kuantitas kerja (Y2)
19. Data total score variabel Efektivitas (Y)
20. Data penentuan nilai rank dari variabel Pengaruh (X)
21. Data penentuan nilai rank dari variabel terpengaruh (Y)
22. Data tabel kerja untuk mencari korelasi.

Tabel Prosentase Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peta wilayah Kecamatan Ringinrejo
2. Daftar panduan pertanyaan
3. Ijin penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember
4. Ijin penelitian dari kantor kesatuan bangsa tingkat II kediri
5. Ijin Penelitian dari Kantor Kecamatan Ringinrejo.

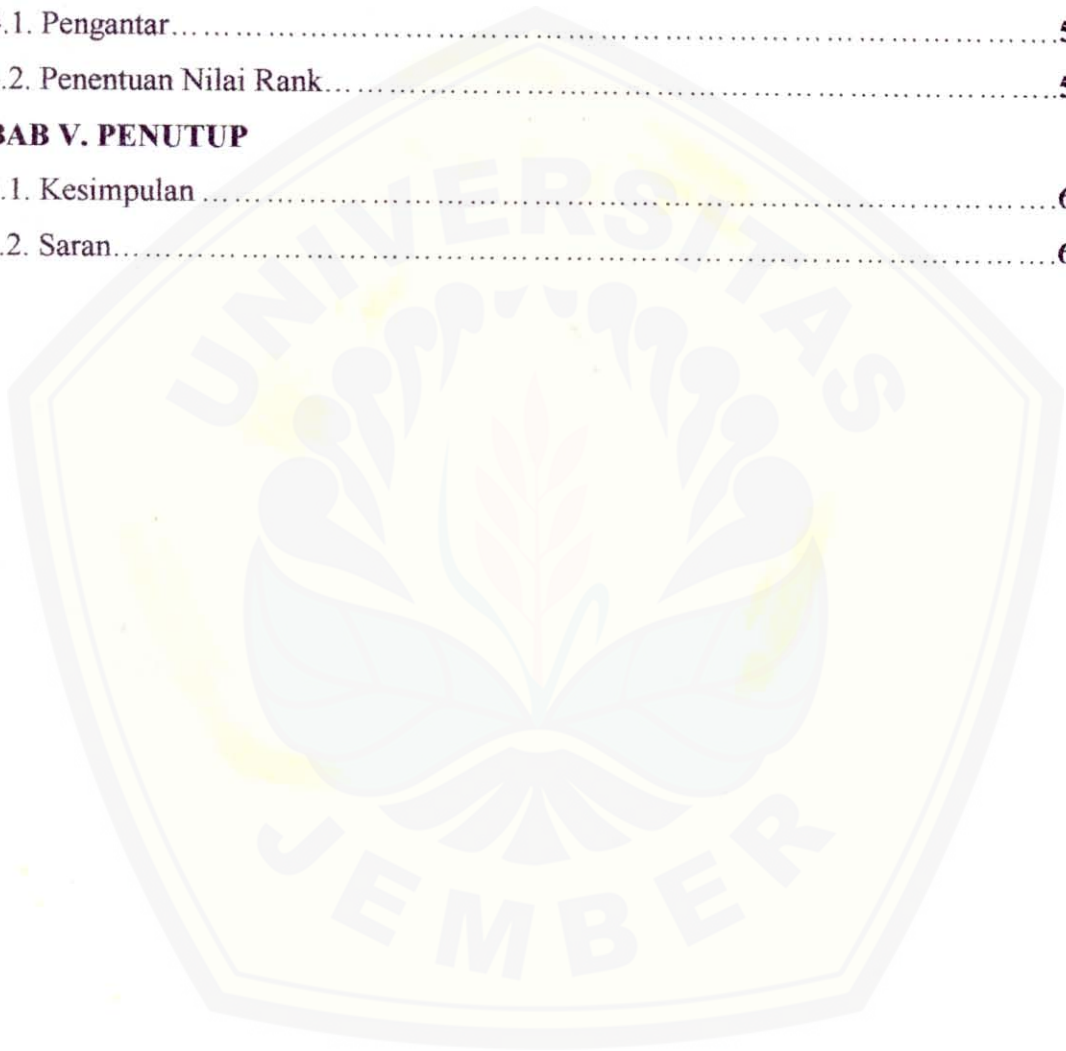


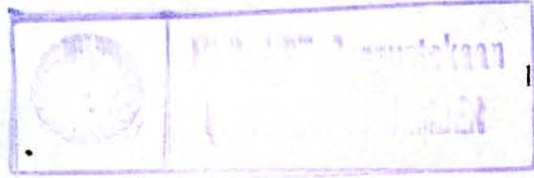
DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Motto | ii |
| Halaman Persembahan | iii |
| Halaman Pengesahan..... | iv |
| Kata Pengantar | v |
| Daftar Tabel | vi |
| Daftar Lampiran..... | viii |
| Daftar Isi | ix |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar belakang..... | 1 |
| 1.2. Perumusan masalah..... | 10 |
| 1.3. Tujuan dan kegunaan Penulisan..... | 11 |
| 1.3.1 Tujuan Penulisan..... | 11 |
| 1.3.2 Kegunaan Penulisan..... | 11 |
| 1.4. Kerangka Teori..... | 12 |
| 1.5. Konsepsi Dasar | 17 |
| 1.5.1. Konsep Kemampuan (X) | 18 |
| 1.5.1.1. Kemampuan Intelektual (X1)..... | 19 |
| 1.5.1.2. Kemampuan Fisik (X2)..... | 20 |
| 1.5.2. Konsep Efektifitas (Y) | 20 |
| 1.5.2.1. Kualitas Kerja (Y1)..... | 22 |
| 1.5.2.2. Kuantitas kerja (Y2) | 22 |
| 1.5.3. Teori (Hubungan antara konsep kemampuan dengan konsep efektifitas) | 22 |
| 1.6. Hipotesis..... | 23 |
| 1.7. Definisi Operasional..... | 24 |

| | |
|--|----|
| 1.7.1. Operasionalisasi Variabel (X) Kemampuan aparat pemungut pajak di wilayah kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri | 25 |
| 1.7.1.1. Tingkat Kemampuan Intelektual aparat pemungut pajak (X1)..... | 25 |
| 1.7.1.2. Tingkat Kemampuan Fisik aparat pemungut pajak (X2) | 26 |
| 1.7.2. Operasionalisasi Variabel (Y) Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kecamatan Ringinrejo kabupaten Kediri | 26 |
| 1.7.2.1. Kualitas Kerja (Y1)..... | 27 |
| 1.7.2.2. Kuantitas Kerja (Y2)..... | 27 |
| 1.8. Metode Penelitian | 28 |
| 1.8.1. Penentuan Populasi | 28 |
| 1.8.2. Penentuan Sampel..... | 29 |
| 1.8.3. Metode Pengumpulan Data..... | 29 |
| 1.8.3.1. Tehnik Observasi | 30 |
| 1.8.3.2. Tehnik Wawancara | 30 |
| 1.8.3.3. Tehnik Dokumentasi | 31 |
| 1.8.3.4. Tehnik Kuisisioner..... | 31 |
| 1.8.4. Metode Analisa Data..... | 31 |
| BAB II. DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN | |
| 2.1. Awal berdirinya kecamatan Ringinrejo | 34 |
| 2.2. Letak dan keadaan geografis..... | 35 |
| 2.3. Kondisi masyarakat atau penduduk | 36 |
| BAB III. PENYAJIAN VARIABEL PENELITIAN | |
| 3.1. Pengantar..... | 44 |
| 3.2. Variabel Pengaruh (X) Kemampuan aparat pemungut pajak | 44 |
| 3.2.1. Nilai Responden dari indikator Kemampuan Intelektual aparat pemungut pajak (X1)..... | 45 |
| 3.2.2. Nilai Responden dari indikator Kemampuan Fisik aparat pemungut pajak (X2)..... | 46 |

| | |
|--|----|
| 3.3. Variabel Terpengaruh (Y) Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan | 46 |
| 3.3.1. Kualitas Kerja (Y1)..... | 46 |
| 3.3.2. Kuantitas kerja(Y2)..... | 47 |
| BAB IV. ANALISA DAN INTERPRETASI DATA | |
| 4.1. Pengantar..... | 54 |
| 4.2. Penentuan Nilai Rank..... | 55 |
| BAB V. PENUTUP | |
| 5.1. Kesimpulan | 64 |
| 5.2. Saran..... | 65 |





I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam GBHN tahun (1999:202) ditegaskan bahwa pembangunan daerah perlu senantiasa ditingkatkan dan dilaksanakan secara terpadu, selaras, serasi, dan seimbang serta diarahkan supaya pembangunan yang diinginkan setiap daerah sesuai dengan prioritas dan potensi daerah agar laju pertumbuhan antar daerah semakin serasi dan seimbang, sehingga pelaksanaan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya semakin merata di seluruh Indonesia.

Pembangunan daerah merupakan salah satu arah dari strategi pembangunan nasional yang berorientasi pada pertumbuhan dan pemerataan. Secara operasional pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan pemberian prinsip-prinsip otonomi dan pendelegasian wewenang kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan di daerah (Sumodiningrat dan Subroto, 1996).

Otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kartasasmita, 1996:346). Makna otonomi daerah dalam hal ini ditempatkan dalam kerangka memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan berbagai program pembangunan di daerah.

Pemberian otonomi daerah mempunyai tujuan dan memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di daerah serta mendorong terciptanya kemandirian daerah. Terutama kemandirian pada sektor keuangan daerah dimana pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan pengeluaran rutinnya secara mandiri dengan penerimaan daerah yang dimiliki

khususnya yang berasal dari potensi ekonomi (asli) daerah agar mampu bersaing di era globalisasi.

Kebijakan otonomi daerah diatur dalam ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah. Menurut UU No. 22 Tahun 1999, otonomi daerah adalah merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat h).

Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 pasal 7 ayat (1), kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta kewenangan bidang lain. Selanjutnya ayat (2) berbunyi kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional. Oleh karena itu pemerintah daerah harus memiliki sumber-sumber penerimaan sendiri untuk membiayai pengeluaran rutinnya pada saat otonomi daerah diterapkan (Simanjuntak dalam Prosiding, 1999:20).

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, salah satu pilar utama yang harus ditegakkan oleh pemerintah pusat adalah aspek pembiayaan (Basri, 1995:112). Pemerintah daerah harus diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah (Tunggal, 1999:24). Dengan demikian pemerintah daerah dapat melakukan pengelolaan dan pengendalian atas kegiatan ekonomi daerah baik untuk mengoptimalkan penggalan potensi sumber-sumber

penerimaan daerah maupun untuk meningkatkan produktifitas dan peranan sektor swasta di daerah (Maskun, 1996).

Oleh karena itu untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah dalam rangka penerapan otonomi daerah, pemerintah telah menetapkan UU. No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sebagaimana ketentuan yang terdapat di dalamnya, UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 baru diberlakukan atau diterapkan 2 (dua) tahun setelah ditetapkan. Penerapan UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 akan memberikan dampak terjadinya perubahan struktur keuangan pemerintah daerah tingkat II di Indonesia. Perubahan struktur keuangan daerah tersebut disebabkan karena adanya perubahan pada sisi penerimaan dan pengeluaran daerah sebagai berikut :

Pertama, penyerahan kewenangan pemerintah kepada daerah harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Dengan demikian semua bidang pemerintahan kecuali yang telah ditetapkan dalam UU yang berada di daerah untuk selanjutnya pembiayaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang bersangkutan. Hal tersebut akan mendorong perubahan pengeluaran rutin pemerintah daerah. Semakin banyak jumlah kelembagaan yang didesentralisasikan dan berada di suatu daerah, semakin besar kebutuhan dana yang harus disediakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin instansi/dinas tersebut.

Kedua, adanya reformasi pada struktur dan manajemen pengelolaan penerimaan pemerintah daerah. Dalam struktur penerimaan daerah terdapat sumber penerimaan daerah baru yang disebut penerimaan dana perimbangan bagian daerah atas penerimaan yang berasal dari beberapa potensi ekonomi daerah. Sumber penerimaan tersebut telah memberikan sejumlah tertentu (berdasarkan prosentase) pendapatan kepada pemerintah daerah atas penerimaan yang tidak termasuk ke dalam pendapatan asli daerah, sehingga sumber pendapatan yang berasal dari potensi ekonomi (asli) daerah menjadi bertambah. Di samping itu juga pada sisi manajemen pengelolaannya,

pemerintah daerah menjadi memiliki kewenangan yang sangat luas untuk melakukan upaya penggalan daerah. Akibat adanya perubahan tersebut, penerimaan daerah secara keseluruhan akan mengalami perubahan (meningkat atau menurun).

Dalam menjalankan hak otonominya, setiap daerah dapat saja melaksanakan prioritas kegiatannya, namun harus mampu membiayai sendiri kegiatan tersebut. Berdasarkan ketentuan UU No. 25 Tahun 1999 (pasal 3), yang termasuk sumber-sumber pendapatan daerah yaitu :

1. Pendapatan asli daerah (PAD) terdiri atas; (1) hasil pajak daerah, (2) hasil retribusi daerah, (3) hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan dana perimbangan yang terdiri atas; (1) bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, (2) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan (3) penerimaan dari sumber daya alam dengan persentase tertentu (lihat tabel 1).

Sedangkan hasil penerimaan daerah dari perimbangan yang sangat potensial adalah pajak bumi dan bangunan akan tetapi perolehan riil penerimaan daerah dari PBB sangat tergantung dari kemampuan aparat dalam memungut atau menarik pajak kepada wajib pajak. Berikut ini kami ringkaskan prosentase pembagian penerimaan antara pusat dan daerah :

Tabel 1 : Persentase Dana Perimbangan Bagian Daerah Atas Beberapa Sumber Penerimaan Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999.

| No | Jenis Penerimaan | Persentase Perimbangan | | | |
|----|---|------------------------|----------|-----------|-----------|
| | | Pusat | Provinsi | Kab. Asli | Kab. Lain |
| 1. | Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 10 | | 90 | - |
| 2. | Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan | 20 | - | 80 | - |
| 3. | Sumber daya alam : | | | | |
| a. | Pertambangan minyak | 85 | 3 | 6 | 6 |
| b. | Gas alam | 70 | 6 | 12 | 12 |
| c. | Perikanan | 20 | - | 80 | - |
| d. | Kehutanan : | | | | |
| - | IHPH | 20 | 16 | 64 | - |
| - | IHH/Provisi SDA hutan | 20 | 16 | 32 | 32 |
| e. | Pertambangan umum : | | | | |
| - | Iuran tetap (landrent) | 20 | 16 | 64 | - |
| - | Iuran Eksplo dan Ekploi | 20 | 16 | 32 | 32 |

Sumber : Undang-Undang No. 22 dan 25 tahun 1999.

Keterangan : Angka-angka di atas adalah penerimaan kotor, karena belum dikurangi dengan biaya-biaya salah satunya adalah biaya upah pungut.

Berdasarkan tabel diatas, penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbangan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk pemerintah daerah. Penerimaan negara dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk pemerintah daerah. Dari sumber daya alam, pertambangan minyak dengan imbangan 85% (delapan puluh lima persen) pemerintah pusat, 15% (lima belas persen) pemerintah daerah. Gas alam, 70% (tujuh puluh persen) pemerintah pusat, 30% (tiga puluh persen) pemerintah daerah. Perikanan, 20% (dua puluh persen) pemerintah pusat, 80% (delapan puluh persen) pemerintah daerah. Kehutanan, 80% (delapan puluh persen) dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dibagi dengan perincian 16%

(enam belas persen), propinsi 64% (enam puluh empat persen) kabupaten, pusat 20% (dua puluh persen). Sedangkan 80% (delapan puluh persen) dari penerimaan provisi sumber daya hutan dibagi dengan perincian 16% (enam belas persen) propinsi, 32% (tiga puluh dua persen) kabupaten/kota penghasil, 32% (tiga puluh dua persen) kabupaten/kota lainnya, 20% (dua puluh persen) pemerintah pusat. Sektor pertambangan umum dibagi sebagai berikut : untuk iuran tetap 16% (enam belas persen) propinsi, 64% (enam puluh empat persen) kabupaten/kota penghasil, 20% (dua puluh persen) pemerintah pusat. Sedangkan untuk iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi dibagi dengan perincian : 16% (enam belas persen) propinsi, 32% (tiga puluh dua persen) kabupaten/kota penghasil, 32% (tiga puluh dua persen) kabupaten/kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan, 20% (dua puluh persen) pemerintah pusat.

Yang termasuk sumber-sumber pendapatan non (asli) daerah yaitu :

1. Subsidi/bantuan pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari (a) dana alokasi umum dan (b) dana alokasi khusus;
2. Pinjaman daerah;
3. Lain-lain penerimaan daerah yang sah.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri. Di era otonomi daerah, kemandirian daerah merupakan suatu tuntutan yang tidak dapat dielakkan lagi (Maskun, 1996). Kemandirian daerah dalam hal ini adalah tingkat kemampuan daerah dalam membiayai pengeluarannya yang paling minimal yaitu pengeluaran rutin daerah (Esmara, 1986:226). Untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya secara mandiri, salah satu kriterianya adalah kemampuan *self-supporting* penerimaan daerah dalam hal ini pendapatan yang berasal dari potensi ekonomi (asli) daerah atau pendapatan daerah terhadap pengeluaran rutin daerah.

Dari keterangan diatas, maka penerimaan daerah dari sektor pajak sangat menarik untuk dikaji dan dikembangkan, karena :

1. Pajak daerah merupakan salah satu struktur keuangan dibidang non migas untuk memperkecil penerimaan bantuan luar negeri sehingga pajak menjadi misi nasional yang tidak dapat ditawar lagi. (Pasaribu, 1987:16)
2. Daerah dapat terdorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak negara, misalnya memberikan informasi yang luas tentang identitas wajib pajak dan obyek pajak
3. Daerah dapat dengan mudah menghitung bagian hasil pajak negara tersebut yang akan diterima dalam anggaran pendapatan asli daerahnya.

Salah satu jenis pajak yang sangat mempengaruhi sektor penerimaan negara yaitu Pajak Bumi dan Bangunan, dimana sektor PBB di wilayah kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri tidak lepas dari permasalahan dalam mencapai tujuannya, hal ini terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2: Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan wilayah kecamatan Ringinrejo kabupaten Kediri s/d 14 Maret 2000

| No | Desa | Baku (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Sisa (Rp.) | % |
|----|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| 1. | Jemekan | 44.704.866 | 40.681.428 | 4.023.438 | 91 |
| 2. | Srikaton | 24.084.310 | 20.232.500 | 3.853.810 | 84 |
| 3 | Susuhbango | 15.733.761 | 14.632.397 | 1.101.364 | 93 |
| 4 | Nambakan | 12.072.118 | 11.709.954 | 362.164 | 97 |
| 5 | Selodono | 37.031.733 | 34.809.829 | 2.221.904 | 94 |
| 6 | Purwodadi | 17.898.905 | 16.466.992 | 1.431.913 | 92 |
| 7 | Dawung | 17.875.629 | 15.551.797 | 2.323.839 | 87 |
| 8 | Batuaji | 23.286.731 | 21.656.659 | 1.630.072 | 93 |
| 9 | Deyeng | 28.846.380 | 27.980.988 | 865.392 | 97 |
| 10 | Ringinrejo | 26.612.328 | 24.217.218 | 2.395.110 | 91 |
| 11 | Sambi | 27.706.855 | 24.659.100 | 3.047.755 | 89 |
| | Jumlah | 275.855.616 | 252.598.822 | 23.256.756 | 92 |

Sumber: Data Primer Kec. Ringinrejo

Dari tabel diatas dan kami sesuaikan dengan standart pengukuran yang penulis dapatkan maka penulis menyimpulkan bahwa pemungutan pajak di kecamatan Ringinrejo tergolong baik dengan asumsi bahwa pemungutan yang mencapai antara 0% s/d 40% tergolong kurang, 41% s/d 80% tergolong cukup dan 81% s/d 100% tergolong baik hal tersebut seperti yang terdapat dalam tabel dibawah ini.

Tabel Prosentase Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

| No | Prosentase | Hasil Pemungutan |
|----|------------|------------------|
| 1. | 0% - 40 % | Kurang |
| 2. | 41% - 80% | Cukup |
| 3. | 81% - 100% | Baik |

Sumber: Kasir kec. Ringinrejo

Permasalahan yang dihadapi dalam memungut atau menarik PBB dapat dikategorikan dalam 2 (dua) hal, yaitu internal dan eksternal. Faktor eksternal yang sangat dominan adalah kondisi wajib pajak sendiri. Sedangkan faktor internal adalah kelembagaan dan kemampuan aparat dalam melaksanakan tugasnya.

Selanjutnya dalam rangka pengelolaan dan pemungutannya Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kecamatan Ringinrejo, sukses tidaknya ditentukan beberapa faktor, berdasarkan data yang penulis peroleh adalah sebagai berikut : faktor dari pihak Dispenda dalam mengeluarkan SPPT, dari aparat pemungutnya dan dari masyarakatnya.

Stephen P. Robbin, (1996:24), untuk bekerja dengan efektif, suatu tim menuntut 2 (dua) tipe yang berlainan. *Pertama*, tim perlu orang-orang dengan keahlian teknis, *kedua*, perlu orang dengan ketrampilan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan pendapat diatas, kemampuan aparat merupakan penunjang besar bagi kelancaran terselesainya tugas yang dibebankan kepada seseorang. Yang dimaksud dengan tugas oleh Siagian, (1992:21) adalah pelimpahan kewenangan yang dilakukan dengan teratur kepada orang yang setepat-tepatnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatannya masing-masing tanpa semata-mata tergantung dari itikad baik dan kesediaan mereka.

Peningkatan pelayanan aparat pemungut pajak kepada pembayar pajak senantiasa perlu untuk ditingkatkan lebih lanjut. Tindakan-tindakan yang kurang efektif dari aparat pelaksana tugas akan mempengaruhi penyelesaian dan hasil

pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab aparat sekaligus berpengaruh terhadap efektifitas organisasi atau instansi tersebut.

Menurut Steers (1985:148), Kemampuan aparat atau pegawai dapat mempengaruhi kerjanya. Apabila seorang pegawai tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan bagi seorang pekerja tertentu, maka sulit dipercaya bahwa tingkat prestasinya tinggi.

Lebih lanjut Gibson J.L. Dkk (1996:9), mengatakan efektifitas setiap organisasi sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia yang merupakan sumber daya yang umum bagi semua organisasi.

Adapun dalam sektor pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pemerintah wilayah kecamatan Ringinrejo dalam hubungannya dengan efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya perlu dibahas mengenai :

1. Mengenai keterbatasan kemampuan aparat pemungut pajak menjadikan kendala yang dihadapi pemerintah di tingkat kecamatan Ringinrejo dalam rangka meningkatkan penerimaan pajaknya, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan, dari 11 desa yang ada di kecamatan Ringinrejo terdapat 34 aparat pemungut pajak yang sekaligus sebagai kepala dusun.
2. Efektifitas (tinggi rendahnya) penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kecamatan Ringinrejo yang selama setahun terakhir ini tidak bisa dipenuhi sesuai dengan target bakunya, sehingga hal ini akan berdampak pada kelancaran pelaksanaan pembangunan di daerahnya, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3 : Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 Wilayah Kecamatan Ringinrejo Keadaan s/d Tanggal 14 Maret 2000

| Tahun | Baku | Realisasi | Sisa | % |
|-------|-----------------|-----------------|----------------|----|
| 2000 | Rp. 275.855.616 | Rp. 252.598.822 | Rp. 23.256.756 | 92 |

Sumber : Kasir Kec. Ringinrejo

Fenomena diatas menjadi batu sandungan bagi pemerintah kecamatan Ringinrejo untuk dapat mengembangkan dan menunjang kesinambungan pembangunan dan peningkatan kemandirian bangsa melalui peningkatan keuangan yang makin andal, efisien dan mampu memenuhi tuntutan pembangunan, penciptaan suasana yang mendorong tumbuhnya inisiatif dan kreatifitas masyarakat serta meluasnya peran serta masyarakat dalam pembangunan

Berdasarkan uraian diatas, maka peningkatan kemampuan aparat pemungut pajak suatu hal yang sangat penting dan mendasar sehingga mereka mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Bertolak dari sinilah penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang hubungan kemampuan aparat pemungut pajak terhadap efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

1.2 Perumusan Masalah

Agar penelitian ini mempunyai nilai-nilai ilmiah maka harus menggunakan berbagai persyaratan dan prosedur penelitian yang ada, dimana masalah diungkapkan terlebih dahulu atau dirumuskan sebelum mengadakan penelitian.

Kerlinger (1990:29), mengemukakan bahwa masalah adalah satu kalimat tanya atau pertanyaan yang menanyakan apakah ada hubungan antara 2 (dua) variabel atau lebih. Menurut Kerlinger, terdapat dua kriteria masalah yang baik yaitu :

1. Masalah seharusnya dinyatakan secara jelas dan tidak dalam bentuk yang ambisius, masalah ini biasanya paralel dengan tujuan penelitian.

2. Masalah dan pertanyaan seharusnya berdasarkan uji empiris terlebih dahulu.

Akhirnya berdasarkan penelitian ini penulis memberikan batasan-batasan penentuan perumusan masalah adalah sebagai berikut ;

“Adakah hubungan kemampuan aparat pemungut pajak dengan efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri “.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan

1. Untuk mengetahui tingkat efektifitas penerimaan PBB di wilayah Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui tingkat kemampuan aparat pemungut pajak di lapangan di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.
3. Untuk mengetahui hubungan aparat pemungut pajak dengan efektifitas penerimaan PBB di wilayah Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri

1.3.2 Kegunaan Penulisan

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa atau yang berkepentingan, pada khususnya yang akan dan sedang mengadakan aktifitas penelitian ilmiah.
- b. Menjadi bahan referensi dan kajian bagi upaya penelitian yang lebih mendalam dan koreprehensif terhadap pengembangan potensi pajak daerah di Kabupaten Kediri.
- c. Menjadi sumbangan pemikiran bagi Kabupaten Kediri dan Kabupaten lain pada umumnya.
- d. Sebagai bahan informasi yang kemudian dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

1.4. Kerangka Teori

Pembangunan yang dilaksanakan di daerah pada dasarnya merupakan kepanjangan tangan dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat yang diserahkan pada pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah sendiri yang tahu kondisi secara pasti tentang kondisi daerahnya. Pembiayaan pembangunan menjadi tanggung jawab negara yang dimasukkan dalam anggaran baik anggaran nasional maupun anggaran daerah. Dalam anggaran tersebut secara umum dibagi dalam 2 (dua) kelompok besar : pendapatan dan pengeluaran.

Dalam sisi pengeluaran negara dikenal adanya pengeluaran rutin misalnya belanja pegawai, belanja barang, pembayaran cicilan bunga dan hutang, dan pengeluaran pembangunan yang merupakan biaya pelaksanaan proyek-proyek pemerintah untuk meningkatkan hasil pertanian, sarana perhubungan dan lain-lain.

Konteks pembicaraan yang dibahas adalah dalam pendapatan atau penerimaan pembangunan yang termasuk didalamnya adalah penerimaan pajak daerah khususnya pajak bumi dan bangunan. Pajak daerah sangat diperlukan guna memenuhi kebutuhan keuangan dalam proses organisasi pemerintah daerah, agar bisa berjalan secara lancar dan efektif.

Manullang, (1983:67), mengatakan bagi kehidupan sebuah negara masalah keuangan negara sangat penting, makin baik keuangan sebuah negara maka semakin stabil pula kedudukan pemerintah dalam negara itu. Sebaliknya kalau keuangan negara itu kacau maka pemerintah akan menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan dalam menyelenggarakan segala kewajiban yang diberikan kepadanya. Demikian juga bagi sebuah pemerintah daerah, keuangan merupakan masalah penting baginya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.

Dari uraian diatas, jelas dapat dipahami bahwa pajak merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan, sehingga pemungutan dan pengelolaannya harus

dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin, supaya dapat memberi kontribusi untuk menunjang pembangunan nasional maupun daerah.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. R. Soemitro, S.H., (1997:3)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak adalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fungsi-fungsi pajak menurut Tjahjono dan Muhammad F. Husain, (1997:4) adalah :

1. Fungsi Keuangan Negara (Budgetair)
Yaitu fungsi pajak untuk memasukkan uang ke kas negara atau dengan kata lain sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.
2. Fungsi Mengatur atau non budgetair (Regularend)
Yaitu usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam hal mengatur dan bilamana perlu, mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Dalam fungsi ini, pemungutan pajak digunakan :

- a. Sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.
- b. Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

Keberhasilan dan keberlangsungan pembangunan nasional amat tergantung pada partisipasi seluruh rakyat serta semangat dan disiplin para penyelenggara dan masyarakat, maka dalam perpajakan yang sekarang diharapkan tercapainya sistem perpajakan yang berintikan kesederhanaan agar mudah dimengerti dan memberikan kepastian hukum, sehingga beban pajak selain semakin adil dan wajar, pada akhirnya diharapkan akan lebih mendorong wajib pajak melaksanakan kewajiban membayar pajaknya dengan penuh kesadaran.

Agar maksud dan tujuan sebagaimana disebutkan diatas dapat tercapai, perlu diperhatikan sistem pemungutan pajak yang baik. Mardiasmo, (1996:8-9) membagi sistem pemungutan pajak sebagai berikut :

1. Official Assesment System

Official Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terhutang oleh wajib pajak.

2. Self Assesment System

Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terhutang.

3. With Holding System

Sistem dengan holding adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus juga bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terhutang oleh wajib pajak. Ciri-

cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak terhutang ada pada pihak ketiga, pihak diluar fiskus maupun wajib pajak. Lebih lanjut Munawir, (1990:44-45) menambahkan bahwa sistem pemungutan pajak tidak hanya 3 (tiga) macam, melainkan 4 (empat) macam yaitu *Semi Assesment System* yaitu adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh seseorang berada pada dua pihak yaitu pembayar pajak atau wajib pajak dan pemungut pajak atau fiskus (pemerintah). Di Indonesia, terutama pajak bumi dan bangunan sistem yang pertamalah yang digunakan sebab yang menentukan besarnya pajak adalah fiskus adalah pemerintah. Wajib pajak sangat pasif dalam menentukan jumlah pajak bumi dan bangunan, padahal dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam GBHN dapat dikatakan bahwa sistem yang dianut sebenarnya adalah pendewasaan kesadaran hukum masyarakat, sehingga dalam sistem pemungutan pajak berlaku sistem *Self Assesment*. Akan tetapi karena adanya berbagai faktor misalnya sikap mental dan kesadaran hukum masyarakat serta kesadaran hukum para pelaksana hukum administrasi negara yang masih rendah, maka sistem *Self Assesment* sulit dilaksanakan di Indonesia. Oleh karena itu, kesadaran hukum serta pengetahuan hukum masyarakat maupun pelaksana hukum di lapangan perlu ditingkatkan.

Lebih lanjut mengenai Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

1. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pendapat nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat, sesuai dengan kemampuannya
2. Pajak bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang lain atau badan yang mempunyai suatu

hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya, dan oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak.

3. Sesuai dengan amanat yang terkandung dalam GBHN perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan, sehingga dapat mewujudkan peran serta dan kegotongroyongan masyarakat, dan oleh karena itu perlu diakhiri melalui pembaharuan sistem perpajakan yang sederhana, mudah, adil dan memberi kepastian hukum.

Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Pengertian bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi mencakup tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak pengairan) serta wilayah laut Republik Indonesia. Sedangkan pengertian bangunan adalah konstruksi tehnik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan meliputi bangunan tempat tinggal (rumah), gedung kantor, hotel, pabrik, emplasemen dan lain-lain.

Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 sebagai berikut :

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Pengertian bumi disini adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi tehnik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan.

Seperti disebutkan diatas, bahwa pajak bumi dan bangunan dalam operasionalisasi melibatkan pemerintah daerah setempat, demikian halnya dengan pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan imbangan 90% untuk pemerintah tingkat I dan tingkat II sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan sedangkan sisanya 10% merupakan bagian pemerintah pusat sebagai penerimaan negara.

Hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diterima oleh daerah merupakan pendapatan asli daerah yang setiap tahunnya harus dicantumkan dalam anggaran pembangunan dan belanja daerah. Adapun penggunaannya diselaraskan dengan pembangunan nasional, yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Mekanisme tersebut diharapkan akan merangsang masyarakat di daerah tempat obyek pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan, selanjutnya akan dibahas mengenai kemampuan aparat pemungut pajak sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan. Dalam hal ini penulis mengambil faktor tersebut dengan pertimbangan bahwa sebuah organisasi pemungutan pajak dalam mencapai tujuannya mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya aparat pemungut pajak selain terdapatnya faktor-faktor lain. Hal tersebut juga didukung oleh pendapat Derek Newman, (dalam Moenir, 1995:9), sebagai berikut:

Hidup dan Bergeraknya organisasi berasal dari orang-orang yang ada di dalamnya, baik secara pribadi maupun dalam kelompok. Bentuk organisasi seharusnya memberikan suatu kerangka kerja dan berkelanjutan terhadap gerakan atau kegiatan itu. Untuk itu sendiri disebabkan oleh orang-orang yang bekerja itu dalam organisasi tersebut.

Dari uraian dan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hidup dan Bergeraknya organisasi pemungutan pajak berasal dari kemampuan individu para aparat pemungut pajak itu sendiri

1.5 Konsepsi Dasar

Konsep merupakan unsur penelitian terpenting dan merupakan definisi untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial tertentu. Dalam rangka kegiatan penelitian ini mulai dari awal sampai akhir harus mengikuti kerangka pemikiran yang utuh guna memberikan jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan

dalam bentuk perumusan masalah. Dalam rangka membahas masalah diperlukan sebuah konsep atau pandangan teoritis yang jelas dan benar.

Singarimbun dan Sofian Effendi, (1987:37) mengatakan bahwa :

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi dan proposisi untuk menerangkan sebuah fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Sedangkan yang dimaksud dengan konsep adalah serangkaian abstraksi mengenai sebuah fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sekelompok karakteristik kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu,

Pengertian konsepsi dasar menurut Supranto,(1988:10) adalah sebagai berikut:

Konsepsi dasar adalah pandangan yang teoritis dari definisi singkat yang mendasari pemikiran kita guna mencapai jalan keluarnya atau sebuah pemecahan adari persoalan yang perlu diselidiki. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan pemikiran kita dengan jalan menggabungkan sejumlah peristiwa atau gejala.

Berkaitan dengan pemecahan masalah yang harus dihadapi maka penulis mengajukan suatu konsep sebagai berikut :

1. Konsep kemampuan sebagai variabel pengaruh (X)
2. Konsep efektifitas sebagai variabel terpengaruh (Y)

1.5.1 Konsep Kemampuan

Sumber daya manusia merupakan sebuah aset penting bagi sebuah organisasi. Oleh karena itu peningkatan kemampuan individu merupakan hal yang sangat penting dan harus mendapatkan penanganan serius.

Kemampuan (ability) menurut Stephen P. Robbin (1996:82) merujuk pada suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, hal itulah yang dapat dilakukan seseorang untuk mendefinisikan mengenai kemampuan pada akhir-akhir ini. Keseluruhan kemampuan individu pada hakekatnya tersusun dari dua perangkat faktor: Kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.

Unsur manusia merupakan salah satu faktor penting dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif yang disertai dengan kemampuan individu dalam menyelenggarakan tugasnya untuk lebih memungkinkan tercapainya tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien. Pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif berarti mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Berapa banyak sudah organisasi yang gagal dalam pencapaian tujuannya akibat kurangnya tenaga kerja yang terampil dan potensial. Sehingga kemampuan anggota suatu organisasi merupakan faktor yang sangat penting bagi organisasi dalam melaksanakan fungsinya dan memberikan pelayanan pada masyarakat

Berdasarkan uraian itulah, maka dalam pencapaian tugas organisasi diperlukan orang-orang yang mempunyai tingkat kemampuan tinggi, sehingga akan mampu berbuat lebih banyak demi kemajuan organisasi tersebut, agar organisasi menjalankan fungsinya dengan baik harus didukung oleh anggota organisasi yang punya tingkat kemampuan tinggi.

Mengacu pada uraian diatas, maka untuk pembahasan selanjutnya yang akan digunakan sebagai indikator variabel X dalam penulisan ini adalah :

1. Kemampuan Intelektual (X1)
2. Kemampuan Fisik (X2)

1.5.1.1 Kemampuan Intelektual

Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental. Uji IQ, misalnya, dirancang untuk memastikan kemampuan intelektual umum seseorang sehingga pekerjaan yang berbeda-beda dalam tuntutan yang dikemukakan pada pemangku pekerjaan itu yang digunakan adalah kemampuan intelektual mereka . Berbicara secara umum, makin banyak tuntutan pemrosesan informasi dalam suatu pekerjaan makin banyak kecerdasan umum dan kemampuan verbal diperlukan untuk melakukan pekerjaan itu dengan sukses. Tentu saja IQ yang tinggi tidaklah merupakan syarat untuk semua pekerjaan.

Memang, bagi banyak pekerjaan dimana perilaku seseorang sangat rutin dan tidak ada atau hanya sedikit kesempatan untuk menjalankan kekeluasaan, suatu IQ yang tinggi dapat tidak ada hubungannya dengan kinerja. Bagaimanapun, suatu tinjauan ulang yang saksama terhadap bukti memperlihatkan bahwa uji-uji yang menilai kemampuan verbal, numeris, ruang, dan perseptual merupakan peramal yang sah (valid) akan kemampuan pekerjaan pada semua tingkat pekerjaan. Jadi uji (tes) yang mengukur dimensi kecerdasan yang khusus telah dijumpai sebagai peramal yang kuat dari kinerja. (Robbins:82)

1.5.1.2 Kemampuan Fisik

Kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan ketrampilan serupa, kemampuan fisik yang khusus memiliki makna yang penting untuk melakukan dengan sukses pekerjaan-pekerjaan yang kurang menuntut ketrampilan dan yang lebih terbakukan. Misalnya, pekerjaan dalam mana sukses menuntut stamina, kecekatan tangan kekuatan tungkai atau bakat-bakat serupa yang menuntut kapabilitas fisik seseorang (Robbins:83)

1.5.2 Konsep Efektifitas

Seorang aparat pemungut pajak hendaknya menyelenggarakan dan melaksanakan tugas organisasi dengan sebaik-baiknya, agar hal itu dapat tercapai setiap aparat harus dapat melaksanakan tugasnya seefektif mungkin. Efektivitas menurut Emerson (1988:81) adalah, "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, jelasnya bila sasaran atau tujuan yang telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya berarti efektif.

Gibson dkk, dalam bukunya yang berjudul "Organisasi (perilaku, struktur, proses) menjelaskan bahwa organisasi dapat efektif adalah bila terfokus pada satu atau seluruh ketiga perspektif (efektivitas individu, efektifitas

kelompok dan efektivitas organisasi). Gibson dkk (1996 : 29) menjelaskan sebagai berikut :

Efektivitas individual adalah tingkat efektivitas paling dasar, yang menekankan pada kinerja tugas dari karyawan tertentu atau organisasi, tugas yang dikerjakan merupakan bagian atau posisi dalam organisasi. Efektivitas kelompok adalah jumlah kontribusi seluruh individu, sedangkan efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan efektivitas kelompok, dimana kontribusi dari masing-masing bagian lebih besar dari pada sekedar menjumlahkan secara sederhana.

Lebih lanjut Gibson mengatakan bahwa efektivitas individu adalah kemampuan, keterampilan, pengetahuan, sikap, motivasi dan stress. Efektivitas kelompok adalah keterpaduan, kepemimpinan, struktur, status, peran dan norma-norma, sedangkan efektivitas organisasi adalah lingkungan, teknologi, pilihan strategi, struktur, proses dan culture.

Pendapat di atas maksudnya menyatakan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan pasti menghendaki suatu hasil atau mempunyai suatu tujuan tertentu, dan tujuan tersebut dapat dicapai sesuai dengan yang dikehendaki seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk mengukur apakah pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh pegawai itu efektif atau tidak, perlu dicari terlebih dahulu dimensi-dimensi yang ada didalam efektivitas yang akan dijadikan patokan untuk mengukur atau mengevaluasi tujuan yang telah ditentukan.

Wilson dan Heyel (1987:102) dalam bukunya *Hand Book of Modern Office and Administration Service*, menegaskan sebagai berikut, "Efektivitas sebenarnya terdiri dari dua bagian besar, yaitu *quality of work* (kualitas kerja) dan *quantitive of work* (kuantitas Kerja)

Hal senada dikemukakan oleh Hidayat (1987 : 87) sebagai berikut, "Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan bahwa seberapa jauh target (kualitas, kuantitas,

dan waktu) telah tercapai, semakin besar prosentase target yang telah dicapai maka semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya”.

Berdasarkan uraian diatas dan cara pengukuran efektivitas (pendapat Hidayat) maka indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah indikator-indikator sebagai berikut :

1. Kualitas kerja (Y1)
2. Kuantitas Kerja (Y2)

1.5.2.1 Kualitas kerja (Y1)

Kualitas kerja menurut Wilson dan Heyel (1987:101) adalah, “hal-hal yang menunjukkan bagaimana sebaiknya ia melakukan apa yang ia kerjakan, ketepatan, kelengkapan dan kerapian”. Kualitas mengacu pada mutu kerja seseorang dalam melaksanakan kerjanya yang ditandai oleh ketepatan, kelengkapan dan kemampuan kerjanya. Hal ini juga dapat dilihat dari ketelitian dan ketepatan pegawai dalam melaksanakan atau menyelesaikan setiap tugas atau pekerjaan yang sesuai dengan petunjuk pelaksanaan tugas.

1.5.2.2 Kuantitas Kerja (Y2)

Menurut Wilson dan Heyel (1987:101) yang dimaksud kuantitas kerja adalah, “hal-hal yang menunjukkan jumlah kerja yang dilaksanakan dalam periode yang telah ditetapkan”. Dengan demikian kuantitas kerja mengacu pada banyaknya hasil kerja yang telah dicapai selama kurun waktu yang telah ditetapkan, sekaligus menunjukkan kecepatan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pekerjaannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

1.5.3 Teori (Hubungan antara konsep kemampuan dengan konsep efektivitas)

Pada hakekatnya dalam setiap organisasi, tujuan yang telah ditentukan akan tercapai apabila orang-orang yang terlibat didalamnya mempunyai kemampuan yang memadai. Karena kemampuan merupakan salah satu unsur yang dimiliki oleh setiap

individu, dimana dengan kemampuan itu maka seseorang dapat melaksanakan berbagai macam kewajiban yang harus dikerjakannya. Demikian pula dengan penggunaan kemampuan seseorang pada suatu instansi atau organisasi, harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki agar dapat melaksanakan tugas dengan efektif.

Uraian diatas sesuai dengan pendapat Richard M. Sterss yang mengungkapkan sebagai berikut :

“Jika para pekerja memahami sifat yang setepatnya tentang persyaratan dari suatu pekerjaan, dan mereka memiliki keterampilan dan kemampuan yang diperlukan, kemungkinan bahwa mereka akan bertahan dalam jabatan itu dan melaksanakan pekerjaan yang cocok juga bertambah besar”.(1985:158).

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, jika seseorang memiliki kemampuan yang diperlukan maka mereka akan mampu melaksanakan pekerjaannya secara lebih baik dan lebih mudah untuk mencapai efektivitas pelaksanaan tugasnya.

1.6 Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan yang bersifat sementara dan merupakan suatu rumusan yang menyatakan dugaan yang masih dibuktikan kebenarannya. Untuk lebih jelasnya penulis mengemukakan pendapat Mulyanto (1993:62) yang memberikan definisi mengenai hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Mengekpresikan hubungan antara 2 (dua) variabel atau lebih
2. Memungkinkan pengukuran atau pembuktian empirik
3. Diluar jangkauan judgement, penelitian hipotesis
4. Secara konseptual harus jelas dan ini berhubungan dengan tujuan secara jelas tidaknya teori yang diungkapkan.
5. Tujuannya harus spesifik sehingga dapat diungkapkan kebenarannya

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas serta mengacu pada perumusan masalah dan kerangka teori yang dikemukakan, maka penulis mengemukakan hipotesis sehubungan dengan permasalahan di depan.

H_1 = Ada Hubungan antara kemampuan aparat pemungut pajak dengan efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

H_0 = Tidak Ada Hubungan antara kemampuan aparat pemungut pajak dengan efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

1.7. Definisi Operasional

Fungsi definisi operasional yaitu untuk mengetahui dan mengukur variabel sehingga akan diketahui ada tidaknya hubungan dari masing-masing variabel, menurut Masri dan Effendi (1989:23), "Definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana variabel itu diukur"

Sedangkan untuk menarik variabel dari permasalahan ini yang membahas mengenai peranan daripada kemampuan aparat pemungut pajak sehingga akan mendorong efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diungkapkan oleh Husein Kartasmita (1990:148) sebagai berikut :

Dalam rangka mengefektifkan Pendapatan Asli Daerah, dalam arti meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu ditingkatkan profesionalisme bagi aparaturnya. Profesionalisme dalam hal ini adalah kemahiran atau kemampuan dalam melaksanakan tugas sebagai akibat dari pendidikan dan pengalaman yang terus menerus di bidang pemungutan atau penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang akan memberikan pengaruh besar sekali bagi efektivitas atau peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil kesimpulan berdasarkan permasalahan yang dihadapi bahwa dalam definisi operasional ini terdapat dua variabel yang bisa dioperasionalisasikan dalam penelitian ini yaitu :

1. Operasional Variabel (X) : Kemampuan aparat pemungut pajak di wilayah kecamatan Ringinrejo kabupaten Kediri.
2. Operasional Variabel (Y) : Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kecamatan Ringinrejo kabupaten Kediri.

1.7.1 Operasionalisasi Variabel (X) Kemampuan aparat pemungut pajak di wilayah Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri

Peranan manusia dalam suatu organisasi adalah sangat penting, baik buruknya ataupun hidup matinya organisasi tergantung pada manusianya. Seperti pendapat Moenir (1985:57) bahwa peranan manusia dalam organisasi adalah sangat menentukan, oleh karena itu hidup matinya organisasi sangatlah tergantung pada manusianya.

Demikian juga dengan kemampuan aparat pemungut pajak, yang dalam penelitian ini merupakan variabel bebas, sehingga dengan demikian kemampuan aparat pemungut pajak dapat diukur dari beberapa indikator yaitu :

1. Kemampuan Intelektual aparat pemungut pajak (X1)
2. Kemampuan fisik aparat pemungut pajak (X2)

1.7.1.1 Kemampuan Intelektual aparat pemungut pajak (X1)

Item-item yang dapat dipergunakan untuk mengukur pencapaian tingkat Kemampuan Intelektual aparat pemungut pajak yaitu :

1. Kemampuan di bidang berhitung dengan cepat dan tepat
2. Kemampuan memahami apa yang dibaca atau didengar serta hubungan kata satu sama lain
3. Kemampuan mengenali kemiripan dan beda visual dengan cepat dan tepat
4. Kemampuan mengenali suatu urutan logis dalam suatu masalah dan kemudian memecahkan masalah itu
5. Kemampuan menahan dan mengenang kembali pengalaman masa lalu
6. Kemampuan membayangkan bagaimana suatu obyek akan tampak seandainya posisinya dalam ruangan dirubah

1.7.1.2. Kemampuan fisik aparat pemungut pajak (X2)

Item-item yang dapat dipergunakan untuk mengukur kemampuan fisik aparat pemungut pajak adalah :

1. Kemampuan untuk mengenakan kekuatan otot secara berulang-ulang atau sinambung sepanjang suatu kurun waktu (Kekuatan Dinamis)
2. Kemampuan memenuhi target yang menuntut tenaga maximal (Kekuatan stamina)
3. Kemampuan melakukan gerakan dengan cepat (Keluwesannya Dinamis)

Sedangkan pemberian score atas jawaban responden adalah ;

1. Responden menjawab selalu diberi nilai 3
2. Responden menjawab kadang-kadang diberi nilai 2
3. Responden menjawab tidak pernah diberi nilai 1

1.7.2. Operasionalisasi Variabel (Y) Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kecamatan Ringinrejo kabupaten Kediri

Dalam variabel efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, disini penulis menekankan pada efektifitas individual sebagai variabel yang diteliti, karena efektivitas individu dalam organisasi adalah tingkat yang paling dasar yang dapat menyebabkan efektivitas untuk tingkat selanjutnya. Untuk menilai efektivitas individual ini penulis meninjau dari pendekatan tujuan dimana keberadaan organisasi dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, efektivitas adalah pencapaian sasaran bersama.

Hal ini sesuai dengan pendapat Adam Indrawijaya (1989:225) bahwa, “untuk menilai suatu organisasi efektif atau tidak secara keseluruhan ditentukan oleh apakah tujuan organisasi tercapai dengan baik atau tidak”

Sedangkan yang dimaksud efektivitas penerimaan adalah pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan seseorang atau organisasi yang dapat menimbulkan suatu

akibat terselesaikannya pekerjaan sesuai dengan target (penerimaan) yang telah ditetapkan sebelumnya.

Efektivitas penerimaan merupakan variabel terpengaruh dalam penelitian ini, dimana efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kecamatan Ringinrejo kabupaten Kediri merupakan variabel (Y) yang menggunakan indikator sebagai berikut :

1.7.2.1 Kualitas kerja (Y1)

Kualitas kerja adalah sejauh mana suatu mutu kerja seorang pegawai/aparat dalam menjalankan tugasnya meliputi ketepatan, kelengkapan serta kerapian. Yang dalam hal ini adalah mengenai kualitas kerja aparat pemungut Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk mengukur kualitas kerja digunakan item sebagai berikut :

1. Aktifitas pelaksanaan tugas/pekerjaannya yang dilakukan atas ketepatan kerjanya
2. Aktifitas pelaksanaan tugas/pekerjaannya yang dilakukan atas kelengkapan kerjanya
3. Aktifitas pelaksanaan tugas/pekerjaannya yang dilakukan atas kerapian pekerjaannya.

1.8.3.3. Kuantitas kerja (Y2)

Kuantitas kerja disini mengandung pengertian bahwa jumlah kerja yang dihasilkan pada periode waktu tertentu juga melihat ketepatan seseorang dalam memenuhi tugasnya, untuk mengukur kuantitas kerja aparat pemungut Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan item-item sebagai berikut :

1. Banyaknya tugas atau pekerjaan yang dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
2. Keseimbangan antara banyaknya hasil pekerjaan atas waktu tertentu yang diperlukan
3. Keseimbangan antara hasil kerja yang diselesaikan dengan gaji atau upah yang diberikan.

Selanjutnya untuk mengukur data berdasar “item” pada indikator kualitas kerja (Y1), indikator kuantitas kerja (Y2) penulis menentukan sebagai berikut :

1. Responden yang menjawab selalu diberi nilai 3
2. Responden yang menjawab kadang-kadang diberi nilai 2
3. Responden yang menjawab tidak pernah diberi nilai 1

1.8 Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian ilmiah diperlukan suatu metode sebagai landasan dalam upayanya mendapatkan data-data yang obyektif, lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mengingat data dalam penelitian maka dalam pengumpulan data yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan diperlukan suatu metode ilmiah. Uraian tersebut seperti diungkapkan oleh Husen Umar (1998:59) sebagai berikut, Research dapat didefinisikan sebagai suatu pemeriksaan atau pengujian yang teliti dan kritis dalam mencari fakta atau prinsip-prinsip penyelidikan guna memastikan suatu hal menurut metode ilmiah”.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa metode research merupakan suatu cara untuk menyelesaikan masalah atau obyek lain yang menjadi obyek penelitian, sehingga penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Penentuan populasi
2. Teknik penentuan sampel
3. Teknik pengumpulan data
4. Metode analisa data

1.8.1. Penentuan Populasi

Sebelum mengadakan penelitian maka terlebih dahulu dilakukan penentuan populasi yang hendak diteliti. Menurut Masri dan Effendi (1989:152) yang dimaksud populasi adalah, “Jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga”.

Dalam hal ini populasi yang dijadikan penelitian adalah seluruh aparat pemungut pajak yang ada di kecamatan Ringinrejo yang terdiri dari para staff di desa yaitu para kepala dusun di wilayah kecamatan Ringinrejo yang terbagi dalam 11 desa.

1.8.2. Penentuan Sampel

Hal penting yang perlu dilakukan dalam penelitian adalah penentuan sampel, karena tidak seluruh jumlah individu dalam populasi diperlukan untuk diteliti seperti yang dikemukakan oleh surachmad (1985:93) sebagai berikut :

Karena tidak mungkin menyelidiki selalu langsung menyelidiki segenap populasi, padahal tujuan penelitian ini adalah selalu menemukan generalisasi dapat berlangsung secara umum, karena sering penyelidikan terpaksa menggunakan sebagian saja dari populasi yakni sejumlah sampel yang dipandang representatif terhadap penelitian kita.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa metode pengambilan sampel ini diharapkan dapat memberikan gambaran dari keseluruhan individu yang diteliti, maka metode yang penulis ambil untuk menentukan individu-individu yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah metode acak.

Mengenai besarnya sampel yang harus diambil, Hadi (1987:6) mengatakan bahwa, "Sebenarnya tidak ada ketentuan yang mutlak berapa persen sampel yang harus diambil, ketiadaan yang mutlak itu tidak perlu menimbulkan keraguan bagi seorang peneliti"

Ketidakadaan ketentuan yang mutlak ini memberikan keleluasaan pada peneliti untuk menetapkan besarnya sampel dalam penelitian. Dalam penelitian ini sampel yang diambil yaitu seluruh aparat pemungut Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di wilayah kecamatan Ringinrejo yaitu 30 aparat yang tersebar di 11 desa dalam wilayah kecamatan Ringinrejo kabupaten Kediri .

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dalam penelitian ini, pengumpulan data yang penulis lakukan dengan menggunakan tehnik sebagai berikut.

1. Teknik observasi
2. Teknik Wawancara
3. Teknik Dokumentasi
4. Teknik Kuisisioner

1.8.3.1 Tehnik Observasi

Yang dimaksud observasi menurut Sutrisno, (1989:16) adalah :

Observasi adalah biasa dan diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang dihadapi.

Jadi dalam observasi ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini metode observasi diartikan sebagai cara pengumpulan data melalui pengamatan dan penentuan secara sistematis terhadap fakta-fakta dan gejala-gejala yang terdapat dalam obyek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan metode ini harus mengandalkan benar-benar kepada kepekaan indera (utamanya mata dan telinga). Kecermatan dan kejelian dalam membedakan antara suatu peristiwa yang diikuti secara seksama.

1.8.3.2 Teknik wawancara

Teknik wawancara dilakukan dengan data-data secara lisan terhadap objek penelitian. Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden untuk mencari keterangan tambahan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden.

Seperti yang dikemukakan oleh Hadi (1987:192), "Pengertian wawancara atau interview adalah sebagai proses tanya jawab dalam mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik sehingga dapat saling melihat dan yang lain dapat mendengar dengan telinganya sendiri.

1.8.3.3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh data dengan cara menggali data dokumen serta surat-surat penting yang ada dilokasi penelitian. Koentjoroningrat (1990:66) berpendapat, "Pada umumnya data yang tercantum dalam berbagai jenis dokumen itu merupakan satu-satunya alat untuk mempelajari permasalahan tertentu, antara lain karena tidak dapat diobservasi lagi dan tidak dapat diingat lagi",

Dalam hubungannya dengan teknik dokumentasi ini penulis mengadakan pencatatan-pencatatan melalui dokumen yang ada di daerah penelitian, yaitu laporan tertulis serta dokumen lainnya.

1.8.3.3 Teknik Kuisisioner

Teknik Kuisisioner dilakukan penulis dengan tujuan bertatap muka dengan responden secara langsung dan menyodorkan kuisisioner yang harus diisi oleh responden, seperti yang dijelaskan oleh koentjoroningrat (1990:88) yang mengemukakan pendapatnya sebagai berikut,"Kuisisioner adalah suatu daftar yang berisikan suatu rangkaian pertanyaan mengenai suatu hal atau dalam suatu bidang, dengan demikian kuisisioner dimaksudkan sebagai suatu daftar pertanyaan untuk memperoleh data berupa jawaban-jawaban dari responden.

1.8.4 Metode Analisa Data

Tahap menganalisa data merupakan tahap atau suatu langkah yang sangat kritis dalam suatu penelitian, peneliti harus dapat pula menentukan metode analisa mana yang digunakan, pemilihan pola ini tergantung pada jenis data yang dikumpulkan. Dalam memperoleh data disini digunakan alat hitung statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan, adapun untuk menguji atau menghitung koefisien korelasi antara variabel pengaruh dan variabel terpengaruh digunakan uji statistik rank spearman.

Menurut Sidney Siegel (1994:273) rumus rank spearman adalah sebagai berikut :

$$r_s = 1 - \frac{\sum_{i=1}^N 6d_i^2}{N^3 - N}$$

Keterangan

r_s = koefisien korelasi

N = Jumlah pengamatan

d_i = Perbedaan rank dari masing-masing pengubah

Adapun dalam cuplikan nilai rank tidak mempunyai nilai kembar, maka nilai kembar itu tidak mempunyai pengaruh terhadap koefisien korelasi. Oleh karena itu rumusan tersebut dapat dipakai, sedangkan apabila terhadap jumlah rank kembar digunakan rumus sebagai berikut :

$$r_s = \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum d_1^2}{2\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}} \quad (\text{ibid :256})$$

dimana :

$$\sum x^2 = \frac{N^3 - N}{2} - \sum T_x$$

$$\sum x^2 = \frac{N^3 - N}{12} - \sum T_x$$

sedangkan untuk mencari $\sum T_x$ dan $\sum T_y$, rumus yang digunakan adalah :

$$\sum T_x = \frac{t^3 - t}{12}$$

$$\sum T_y = \frac{t^3 - t}{12}$$

keterangan :

$\sum T_x$ = Jumlah frekwensi untuk rank kembar pada variabel X

$\sum T_y$ = Jumlah frekwensi untuk rank kembar pada variabel Y

t = Jumlah variasi nilai kembar

Langkah terakhir dari analisa rank spearman adalah menggunakan pengujian significant yang penulis tentukan adalah sebesar 0,05 atau tarap kepercayaan 95% sehingga apabila nilai hitung lebih besar daripada nilai harga tabelnya maka hipotesis nihil dan hipotesa kerjanya diterima, sebaliknya bila harga hitungnya lebih kecil dari harga tabel maka hipotesa nihil diterima dan hipotesa kerja ditolak.

Rumus untuk pengujian rs yaitu :

$$T \text{ test} - rs = \frac{N - 2}{\sqrt{1 - rs^2}}$$

Keterangan :

N = Jumlah pengamatan responden

Y = Jumlah nilai kembar dari nilai x dan y

rs = koefisien korelasi rank spearman

tx = frekwensi nilai kembar dari variabel x

ty = frekwensi nilai kembar dari variabel y

x dan y = variasi antar variabel

di = difrensiasi integral

II. DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

Deskripsi daerah penelitian merupakan suatu gambaran terhadap obyek penelitian yang penulis paparkan dengan tujuan untuk melengkapi data yang terhimpun didalamnya dan diharapkan membantu penulis dalam menganalisa data lebih lanjut. Dengan demikian akan mempunyai nilai yang sangat penting, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain yang membutuhkannya untuk mengetahui secara jelas tentang keadaan atau kondisi daerah yang menjadi obyek penelitian ini. Penyajian daerah penelitian ini juga penulis maksudkan untuk acuan dalam menginterpretasikan data yang telah terhimpun, sehingga dengan demikian akan memperoleh suatu interpretasi data yang dapat dipertanggungjawabkan dan terakumulasi. Untuk memenuhi keperluan dalam penyajian data tentang deskripsi daerah ini, penulis berusaha untuk menghimpun data secara lengkap dan sistematis, maka dibawah ini akan disajikan secara rinci urutan sebagai berikut :

- Awal berdirinya kecamatan Ringinrejo
- Letak dan keadaan geografis
- Kondisi masyarakat atau penduduk

2.1 Awal berdirinya kecamatan Ringinrejo

Kecamatan Ringinrejo terbentuk berdasarkan Sk Bupati Kepala Daerah No: 183/1998 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan kecamatan dan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 49 tahun 1999 tentang pembentukan 9 (sembilan) kecamatan di wilayah Daerah Tingkat II Malang, Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Blitar, Lumajang, dan Kediri dalam wilayah propinsi Daerah Tingkat I Jatim yang sesuai dengan ketentuan pasal 132 (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan di daerah yang bertujuan untuk memperlancar tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sehingga dipandang perlu untuk membentuk kecamatan baru di wilayah kabupaten Daerah Tingkat II.

Berdasarkan SK Bupati KDH No: 183/1998 pasal 9 ayat 2,3 dan 4 yang berbunyi bahwa wilayah kecamatan Ringinrejo, semula merupakan bagian dari wilayah kecamatan Kandat dan wilayah kecamatan Kras, dengan dibentuknya kecamatan Ringinrejo, maka wilayah kecamatan Kandat dan wilayah kecamatan Kras dikurangi dengan wilayah kecamatan Ringinrejo, sedangkan pusat pemerintahan kecamatan Ringinrejo berada di desa Ringinrejo.

2.2 Letak Dan Keadaan Geografis

Kecamatan Ringinrejo sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Kediri dengan luas areal seluruhnya meliputi 5195,7 Km², terdiri dari 12 desa berdasarkan penggunaan tanahnya luas wilayah kecamatan Ringinrejo terdiri dari :

1. Sawah : 1649,3 Ha
2. Tegal atau tanah kering pertanian : 1747,3 Ha
3. Bangunan dan pekarangan : 3536,5 Ha
4. Hutan negara : 0
5. Lain-lain : 103,85 Ha

Secara geografis wilayah kecamatan Ringinrejo mempunyai kondisi yang sangat potensial sebagai daerah pertanian hal itu ditunjukkan dengan adanya curah hujan yang cukup tinggi dan suhu yang mendukung, hanya masalahnya jumlah petani yang mau mengusahakan tanahnya semakin mengalami penurunan dari tahun ke tahun, karena hasil yang diperoleh kurang bisa diharapkan untuk menunjang kebutuhan mereka. Secara tata letak wilayah Kecamatan Ringinrejo berada pada :

- a. Ketinggian dari permukaan laut : 100 M
- b. Banyaknya curah hujan : 24,0 (mm/hari)
- c. Topografi : dataran
- d. Suhu rata-rata : 24 - 32 derajat celcius

2.3 Kondisi masyarakat atau Penduduk

Masyarakat atau penduduk di wilayah Kecamatan Ringinrejo yang berjumlah sekitar 50.044 jiwa ini mempunyai komposisi tingkat pendidikan yang cukup, hal ini terlihat pada tingkat pendidikan para kepala keluarga yang sesuai dengan data yang penulis peroleh dan ditunjukkan dengan tabel berikut :

Tabel 4: Komposisi Kepala Keluarga Menurut Tingkat Pendidikan di Wilayah Kecamatan Ringinrejo.

| No | Pendidikan | Jumlah | Prosentase |
|----|-------------------|--------|------------|
| 1 | Tidak tamat SD | 24382 | 43% |
| 2 | Tamat SD – SLTP | 18633 | 37% |
| 3 | Tamat SLTA keatas | 7029 | 20% |

Sumber : Monografi Kecamatan Ringinrejo

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan kepala keluarga di wilayah Kecamatan Ringinrejo termasuk kategori cukup mengingat hampir 80% kepala keluarga sudah mengenal baca tulis hal tersebut secara tidak langsung juga terpengaruh terhadap mata pencaharian para kepala keluarga yang kebanyakan berprofesi sebagai buruh tani dan petani. Hal ini tersebut ditunjukkan dengan tabel berikut :

Tabel 5: Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Wilayah Kecamatan Ringinrejo.

| No | Mata Pencaharian | Jumlah | Prosentase |
|----|----------------------|--------|------------|
| 1 | Petani | 13051 | 19% |
| 2 | Buruh Tani | 15112 | 44% |
| 3 | Pengusaha industri | 3655 | 9% |
| 4 | Buruh bangunan | 3621 | 4% |
| 5 | Pengangkutan | 3543 | 3% |
| 6 | Pegawai Negeri Sipil | 4207 | 10% |
| 7 | Pensiunan | 4396 | 11% |

Sumber : Monografi Kecamatan Ringinrejo

Selain kondisi pendidikan dan mata pencaharian yang cukup memadai, yang juga berpengaruh kepada kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan melalui kesadarannya membayar pajak, salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan, hal ini terlihat dari penerimaan pajak itu sendiri hampir sesuai dengan jumlah baku yang diinginkan hal tersebut dapat kita lihat melalui daftar realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan selama setahun anggaran.

Tabel 6: Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 Wilayah Kecamatan Ringinrejo Keadaan s/d Tanggal 14 Maret 2000.

| Tahun | Baku | Realisasi | Sisa | % |
|-------|-----------------|-----------------|----------------|----|
| 2000 | Rp. 275.855.616 | Rp. 252.598.822 | Rp. 23.256.756 | 92 |

Sumber : Data Primer

Salah satu yang berperan penting dalam penerimaan pajak adalah aparat pemungut pajak atau staf desa yang juga ikut berpartisipasi dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pada masing-masing desa, dimana para aparat pemungut pajak di Kecamatan Ringinrejo adalah para kepala dusun yang terdapat di masing-masing desa di lingkungan Kecamatan Ringinrejo hal ini nampak pada tabel komposisi aparat pemungut pajak di bawah ini.

Tabel 7: Komposisi Aparat Pemungut pajak berdasarkan status atau Kedudukannya di Wilayah Kecamatan Ringinrejo.

| No | Status/Kedudukan | Desa | Aparat |
|---------------|------------------|------------|-----------|
| 1 | Kepala Dusun | Jemekan | 4 |
| 2 | Kepala Dusun | Srikaton | 3 |
| 3 | Kepala Dusun | Susuhbango | 4 |
| 4 | Kepala Dusun | Nambakan | 3 |
| 5 | Kepala Dusun | Selodono | 5 |
| 6 | Kepala Dusun | Purwodadi | 2 |
| 7 | Kepala Dusun | Dawung | 3 |
| 8 | Kepala Dusun | Batuaji | 2 |
| 9 | Kepala Dusun | Deyeng | 2 |
| 10 | Kepala Dusun | Ringinrejo | 2 |
| 11 | Kepala Dusun | Sambi | 4 |
| Jumlah | | | 34 |

Sumber : Kantor Kecamatan Ringinrejo

Data tersebut menunjukkan bahwa aparat pemungut pajak terdiri dari orang-orang yang statusnya sama yaitu para staf di desa, yaitu para kepala dusun yang ikut berpartisipasi dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Tabel 8: Komposisi Aparat Pemungut Pajak Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Wilayah Kecamatan Ringinrejo.

| No | Pendidikan | Jumlah | Prosentase |
|---------------|------------|-----------|-------------|
| 1 | Sarjana | 3 | 5% |
| 2 | SLTA | 8 | 25% |
| 3 | SLTP | 18 | 60% |
| 4 | SD | 5 | 10% |
| Jumlah | | 34 | 100% |

Sumber : Monografi Kecamatan Ringinrejo

Tabel 8 menunjukkan bahwa aparat pemungut pajak masih didominasi oleh tingkat pendidikan yang menengah hal itu ditunjukkan dengan prosentase pendidikan SLTP sebagai kategori paling tinggi sedangkan kategori SLTA dengan prosentasi cukup atau sedang 25% dan prosentase terkecil adalah pendidikan sarjana 5%.

Selain tingkat pendidikan formal dan pengalaman yang mereka peroleh, masih ada faktor penunjang lain yang mendukung kemampuan aparat untuk meningkatkan kinerja. Hal ini bisa dilakukan melalui pelatihan-pelatihan yang diarahkan pada pencapaian kemampuan dari masing-masing aparat pemungut pajak tersebut.

Tabel 9: Komposisi Aparat Pemungut Pajak Berdasarkan Lama Kerja Atau Pengalaman Kerja.

| No | Lama Kerja | Jumlah | Prosentase |
|---------------|---------------------|-----------|-------------|
| 1 | 1 – 5 Tahun | 7 | 9% |
| 2 | 6 – 10 Tahun | 9 | 31% |
| 3 | Lebih dari 11 Tahun | 18 | 60% |
| Jumlah | | 34 | 100% |

Sumber : Monografi Kecamatan Ringinrejo

Pengalaman kerja aparat pemungut pajak menunjukkan bahwa tingkat pengalaman kerja aparat pemungut pajak adalah tinggi. Hal ini berpengaruh di dalam pelaksanaan tugas yang dapat meningkatkan apresiasi seorang pegawai atau aparat pada tugas-tugasnya, baik dari daya kreasi maupun kecakapannya.

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemungutan para aparat pemungut menyatakan bahwa kegiatan pemungutan pajak merupakan aktivitas keseharian yang dilakukan selain aktivitas rutin lainnya. Sehingga frekwensi pemungutan juga tergantung pada kegiatan rutinnnya. Misalnya aparat pemungut yang sekaligus sebagai staff didesa maka kegiatan pemungutan tergantung pada terselesaikannya tugas-tugas di kantor desa. Selain itu pemungutan juga harus melihat kondisi waktu ada tidaknya wajib pajak dirumah.

Frekwensi pemungutan aparat pemungutan pajak apabila digambarkan secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 10: Frekwensi Pemungutan Pajak

| No | Status | Jam/hari |
|----|---------|----------|
| 1 | Sarjana | 5 |
| 2 | SLTA | 6-7 |
| 3 | SLTP | 6-7 |
| 4 | SD | 6-7 |

Sumber : Data Primer

Tabel tersebut menunjukkan bahwa aparat pemungut pajak yang berpendidikan sarjana mempunyai frekwensi penarikan sebih sedikit dibandingkan dengan status lainnya, dengan asumsi bahwa selain kegiatannya sebagai aparat pemungut pajak mereka mereka juga bertugas sebagai kepala dusun di desa masing-masing.

Usaha lain yang dapat dilihat ialah melalui frekwensi kegiatan pemungutan yaitu pada keikutsertaannya dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan

usaha peningkatan kemampuan aparat pemungut pajak yang diselenggarakan pihak atasnya, serta usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak atau masyarakat untuk membayar pajak, dalam hal ini usaha yang dilakukan adalah mengadakan siaran keliling, melalui surat edaran dan melalui kelompok pengajian.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari beberapa informan tersebut menunjukkan bahwa dari 34 aparat pemungut pajak tersebut sebanyak 6 orang atau 20% aparat pemungut pajak termotivasi untuk meningkatkan frekwensi pemungutan, dan sebanyak 13 orang atau 30% termotivasi meningkatkan frekwensi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak melalui kegiatan-kegiatan tersebut diatas dan sebanyak 15 orang atau 50% termotivasi mengikuti kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan mereka yang diselenggarakan oleh pihak atasnya. Atau apabila digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 11: Tabel Prosentase Motivasi Aparat Pemungut Pajak

| No | Motivasi Aparat Pemungut Pajak | Jumlah | % |
|---------------|---|--------|-------|
| 1 | Menambah frekwensi pemungutan | 6 | 20 |
| 2 | Meningkatkan kesadaran WP | 13 | 40 |
| 3 | Mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kemampuan | 15 | 40 |
| Jumlah | | 34 | 100 % |

Sumber : Data Primer

Selain adanya motivasi aparat pemungut pajak seperti terlihat pada tabel 11 diatas, pada dasarnya masih terdapat kesulitan dilapangan yang dihadapi aparat pemungut pajak tersebut, misalnya para wajib pajak yang berprofesi sebagai petani, dalam membayar pajaknya terlebih dahulu harus menunggu masa panen, adanya wajib pajak yang kadang-kadang tidak ada di tempat obyek pajak atau wajib pajak berkedudukan di luar desa dimana obyek pajak berada dan letak wajib pajak yang satu dengan yang lain saling berjauhan.

Untuk menyikapi masalah-masalah yang dihadapi aparat pemungut pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan pihak dispenda bekerjasama dengan pihak kecamatan telah mengupayakan adanya intensifikasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kecamatan Ringinrejo, upaya-upaya tersebut antara lain :

1. Membentuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan di tingkat kecamatan dan memupuk petugas pemungut di tingkat lingkungan berdasar SK Camat Ringinrejo tanggal 1 Mei 1998 No. 973/06/436.512/1998 Tentang intensifikasi pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Menyusun mekanisme kerja dan sistem prosedur administrasi penyampaian SPPT, Penerimaan/penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Membuat estimasi realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan secara rinci dalam tahapan massa tertentu di tingkat kecamatan dan desa.
4. Menyusun jadwal atau rincian kerja kegiatan tim intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan.

Pembentukan tim ini dimaksudkan untuk mengefektifkan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga kegiatan pemungutan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan yaitu tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, sekaligus mampu memotivasi aparat pemungut Pajak Bumi dan Bangunan untuk bekerja lebih produktif.

Sedangkan bagi aparat pemungut pajak, meskipun mempunyai motivasi yang tinggi tetapi tidak mempunyai kemampuan dan pengalaman untuk bekerja dengan baik tidak akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan target sasaran, dimana kemampuan dan pengalaman yang tinggi bagi aparat pemungut pajak akan mendorong tercapainya efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Secara periodik petugas dari kecamatan/desa mengadakan study banding ke wilayah yang sukses dalam hal pemungutan pajak untuk menambah wawasan sehingga petugas pemungut pajak dengan serta merta dapat meningkatkan semangat kerja dalam melaksanakan tugas/pekerjaannya.

Sedangkan sasaran pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah kemanfaatan yang keluar/berasal dari bumi (misalnya hasil yang keluar dari bumi dan atau bangunan atas bumi). Sedangkan subyeknya adalah setiap orang/badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/ memperoleh manfaat atas bangunan.

Pembaharuan perpajakan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menghapuskan keragu-raguan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Persoalan yang muncul adalah bagaimana keefektifannya dalam masyarakat. Sedangkan perihal keberlakuan hukum di dalam masyarakat menurut Soekanto seperti dikutip Harun (dalam Justitia, 1994:1) dipengaruhi oleh faktor-faktor :

1. Kaedah hukum atau peraturan itu sendiri ;
2. Petugas yang menerapkan atau menegakkan
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaedah hukum ;
4. Warga yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Melihat potensi berupa obyek pajak yang telah dituangkan dalam bentuk penetapan, ditagih dan realisasinya peluasannya, ternyata justru sektor perkotaan yang obyeknya sebagian besar sudah diidentifikasi dan diadministrasikan dengan baik penagihannya tidak berhasil melampaui target. Sebagai perbandingan adalah antara desa Ringinrejo dan Sambu yang terkategori sebagai sektor perkotaan serta desa Selodono mewakili sektor pedesaan, dapat ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 12: Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan sektor Pedesaan

| NO | Pedesaan/Perkotaan | Target | Realisasi | % |
|----|--------------------|----------------|----------------|----|
| 1 | Selodono (desa) | Rp. 37.031.733 | Rp. 34.809.829 | 94 |
| 2 | Ringinrejo (kota) | Rp. 26.612.328 | Rp. 24.217.218 | 91 |

Sumber : Kasir Kecamatan Ringinrejo

Sedangkan tabel 6 menunjukkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Ringinrejo belum pernah mencapai target, yakni 100% pada tahun anggaran 1999/2000 dari target Rp.275.855.616 hanya dicapai Rp. 252.598.822 atau 92%. Sebagaimana dalam intensifikasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bahwa untuk mengukur efektifitas atau keberhasilan tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan target waktu penarikan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penarikan atau pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, hal tersebut nampak dalam tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 13. Target waktu pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kecamatan Ringinrejo Periode Tahun 1999/2000

| No | Bulan | Target/Sasaran |
|----|---------------|-----------------|
| 1 | Maret – April | Penyebaran SPPT |
| 2 | Mei | 15% |
| 3 | Juni | 30% |
| 4 | Juli | 45% |
| 5 | Agustus | 60% |
| 6 | September | 75% |
| 7 | Oktober | 90% |
| 8 | November | 100% |

Sumber : Kasir Kecamatan Ringinrejo

Pada tabel 13 diatas menjelaskan mengenai ukuran keberhasilan tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut untuk bulan pertama setelah penyebaran SPPT 15% dari target obyek pajak harus sudah masuk ke kas daerah, bulan kedua 15% dari target, bulan ketiga 30%, bulan keempat 45%, kelima 60%, keenam 75%, ketujuh 90%, dan pada bulan terakhir jatuh tempo harus 100% target bakunya masuk ke kas daerah, dengan dikurangi permasalahan, atau dapat dikatakan bahwa ukuran keberhasilan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ialah dengan melihat jumlah potensi yang telah dituangkan dalam ketetapan dan disampaikan kepada wajib pajak, ditagih dan dihasilkan lalu dimasukkan ke kas daerah.

III. PENYAJIAN DATA VARIABEL PENELITIAN

3.1. Pengantar

Untuk mempermudah kegiatan analisis, data-data yang telah terkumpul harus disajikan secara teratur dan sistematis sesuai dengan urutan variabel penelitian.

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah variabel pengaruh dan variabel terpengaruh sebagai variabel pengaruh (X) adalah kemampuan aparat pemungut dan variabel terpengaruh (Y) adalah efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berangkat dari adanya penentuan variabel penelitian, maka penulis sajikan data-data primer dari jawaban responden yang nantinya akan dianalisis untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara kedua variabel tersebut. Adapaun variabel-variabel yang hendak diukur adalah sebagai berikut :

1. Variabel Pengaruh (X) yaitu kemampuan aparat pemungut pajak yang mempunyai indikator-indikator sebagai berikut :
 - a. Kemampuan Intelektual (X1)
 - b. Kemampuan Fisik (X2)
2. Variabel Terpengaruh (Y) yaitu Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang mempunyai indikator-indikator sebagai berikut :
 - a. Kualitas kerja (Y1)
 - b. Kuantitas kerja (Y2)

3.2 Variabel Pengaruh (X) Kemampuan aparat pemungut pajak

Kemampuan aparat pemungut pajak merupakan variabel pengaruh (X) yang diharapkan dapat memberikan pengaruh pada variabel (Y) yaitu efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Mengenai variabel (X) dalam penelitian ini adalah kemampuan aparat pemungut pajak yang memiliki indikator :

1. Kemampuan Intelektual (X1)
2. Kemampuan Fisik (X2)

Agar lebih jelas gambaran tentang masing-masing indikator tersebut, maka berikut akan diuraikan satu persatu data yang diperoleh penulis dilapangan berdasarkan score yang ada :

3.2.1. Nilai responden dari indikator Kemampuan Intelektual aparat pemungut pajak (X1)

Dalam mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang merupakan salah satu sektor dalam Pendapatan Asli Daerah, harus diperhatikan pula kualitas aparatnya. Kartasmita (dalam Kaho, 1996:48) mengatakan tentang perlunya kualitas aparat sebagai berikut :

Dalam rangka mengefektifkan pemungutan pajak perlu ditingkatkan produktivitas aparatnya. Produktivitas dalam hal ini adalah kemahiran dan kemampuan pelaksanaan tugas di bidang pemungutan antara lain penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah akan memberikan pengaruh yang sangat besar sekali terhadap efektivitas atau peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan pendapat diatas maka Kemampuan Intelektual aparat pemungut pajak merupakan aset penting bagi penerimaan pajak yang bersumber dari penggalian Pendapatan Asli Daerah sehingga hal ini perlu mendapat penanganan serius. Apabila Kemampuan Intelektual aparat pemungut pajak tinggi maka akan mendorong efisiensi dan efektivitas organisasi.

Dalam indikator tingkat kemampuan intelektual ini dapat diukur melalui item sebagai berikut :

- Kemampuan Intelektual aparat pemungut pajak dimana akan mendorong pencapaian target yang dapat dilihat salah satunya adalah dari aktivitas aparat dalam menjalankan tugas-tugasnya, baik itu Kemampuan Intelektual aparat pemungut pajak

yang dihasilkan melalui pengetahuan umum maupun mengetrapkan hasil pendidikan dan latihan untuk mendukung pelaksanaan tugas aparat yang dalam hal ini adalah pemungutan pajak.

3.2.2. Nilai responden dari indikator kemampuan fisik aparat pemungut pajak (X2)

Kemampuan Fisik aparat pemungut Pajak Bumi dan Bangunan merupakan kegiatan dengan mengerahkan Kemampuan Fisik yang dimiliki untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu sehingga tercapai tujuannya (pemungutan pajak).

Dalam indikator Kemampuan Fisik aparat pemungut Pajak ini dapat diukur menggunakan item sebagai berikut :

- Kemampuan Fisik aparat pemungut pajak yang diperoleh melalui kondisi fisik yang dimilikinya, dimana Kemampuan Fisik aparat pemungut pajak tersebut diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan ketrampilan serupa.

3.3 Variabel Terpengaruh (Y) Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Variabel terpengaruh dalam penelitian ini adalah efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, yang mana dalam penelitian ini digunakan indikator sebagai berikut :

3.3.1 Kualitas kerja (Y1)

Kualitas kerja adalah sejauh mana suatu mutu kerja seseorang, yang dalam hali ini adalah aparat pemungut Pajak Bumi dan Bangunan dalam menjalankan tugasnya meliputi ketepatan, kelengkapan, serta kerapian.

Untuk mengukur kualitas kerja. Digunakan item-item sebagai berikut :

1. Aktivitas pelaksanaan tugas/pekerjaan yang dilakukan atas ketepatan kerjanya
2. Aktivitas pelaksanaan tugas/pekerjaan yang dilakukan atas kelengkapan kerjanya.
3. Aktivitas pelaksanaan tugas/pekerjaan yang dilakukan atas kerapian kerjanya.

3.3.2 Kuantitas kerja (Y2)

Kuantitas kerja disini mengandung pengertian bahwa sejumlah kerja yang dihasilkan pada periode waktu tertentu, dimana dalam hal ini adalah seorang aparat pemungut Pajak Bumi dan Bangunan dalam memenuhi tugasnya. Untuk mengukur kuantitas kerja, menggunakan item-item sebagai berikut :

1. Banyaknya tugas/pekerjaan yang dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Keseimbangan antara banyaknya hasil pekerjaan atas waktu tertentu yang diperlukan.
3. Keseimbangan antara hasil kerja yang diselesaikan dengan gaji atau upah yang diterima oleh pekerja.

3.4 Data Variabel Pengaruh (X) dan data Variabel Terpengaruh (Y)

3.4.1 Data Variabel Pengaruh

TABEL XIV DATA SCORE ITEM RESPONSE

VARIABEL PENGARUH INDIKATOR TINGKAT KEMAMPUAN INTELEKTUAL

| No | ITEM RESPONSE (X1) | | | | | | TOTAL SCORE |
|----|--------------------|---|---|---|---|---|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 |
| 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 |
| 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 15 |
| 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 |
| 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 13 |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 |
| 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 |
| 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 |
| 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 |
| 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 |
| 17 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 |
| 18 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 |
| 19 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 |
| 20 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| 22 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 |
| 23 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 |
| 24 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 |
| 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 |
| 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 27 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 28 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 29 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 |
| 30 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 |

Sumber data : Data Primer (hasil quisioner)

TABEL XV DATA SCORE ITEM RESPONSE
 VARIABEL PENGARUH INDIKATOR TINGKAT KEMAMPUAN FISIK

| NO | ITEM RESPONSES (X ₂) | | | TOTAL SCORE |
|----|----------------------------------|---|---|-------------|
| | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 5 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 6 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 7 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 9 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 11 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 12 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 13 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 14 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 16 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 17 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 18 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 19 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 20 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 21 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 22 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 23 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 24 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 25 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 26 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 27 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 28 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 29 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 30 | 3 | 2 | 2 | 7 |

Sumber : Data Primer (Hasil Quisioner)

TABEL XVI
VARIABEL PENGARUH

| NO | VARIABEL (X) | | TOTAL SCORE |
|----|--------------|----|-------------|
| | X1 | X2 | |
| 1 | 14 | 7 | 21 |
| 2 | 15 | 8 | 23 |
| 3 | 17 | 9 | 26 |
| 4 | 15 | 8 | 23 |
| 5 | 14 | 7 | 21 |
| 6 | 15 | 8 | 23 |
| 7 | 14 | 9 | 23 |
| 8 | 16 | 9 | 25 |
| 9 | 16 | 6 | 22 |
| 10 | 13 | 9 | 22 |
| 11 | 17 | 7 | 24 |
| 12 | 14 | 7 | 21 |
| 13 | 14 | 9 | 23 |
| 14 | 15 | 7 | 22 |
| 15 | 13 | 9 | 22 |
| 16 | 17 | 8 | 25 |
| 17 | 12 | 6 | 18 |
| 18 | 12 | 6 | 18 |
| 19 | 14 | 7 | 21 |
| 20 | 12 | 6 | 18 |
| 21 | 13 | 7 | 20 |
| 22 | 14 | 7 | 21 |
| 23 | 13 | 7 | 20 |
| 24 | 12 | 7 | 19 |
| 25 | 12 | 7 | 19 |
| 26 | 12 | 6 | 18 |
| 27 | 10 | 5 | 15 |
| 28 | 14 | 6 | 20 |
| 29 | 14 | 7 | 21 |
| 30 | 12 | 7 | 19 |

Sumber : Data Primer (hasil Quisioner)

3.4.2 Data Variabel Terpengaruh (Y)

TABEL XVII DATA SCORE ITEM RESPONSES

VARIABEL TERPENGARUH INDIKATOR KUALITAS KERJA (Y)

| NO | ITEM RESPONSES (Y1) | | | TOTAL SCORE |
|----|---------------------|----|----|-------------|
| | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 6 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 7 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 10 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 12 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 13 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 14 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 16 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 17 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 18 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 19 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 20 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 21 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 22 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 23 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 24 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 25 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 26 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 27 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 28 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 29 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 30 | 3 | 3 | 3 | 9 |

Sumber data: Data Primer (hasil quisioner)

TABEL XVIII DATA SCORE ITEM RESPONSES

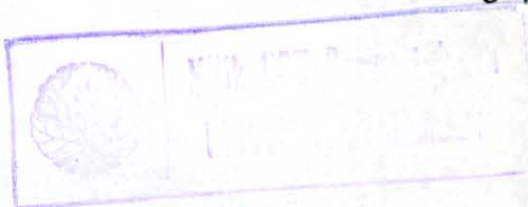
VARIABEL TERPENGARUH INDIKATOR KUANTITAS KERJA (Y)

| NO | ITEM RESPONSES (Y2) | | | TOTAL SCORE |
|----|---------------------|----|----|-------------|
| | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 7 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 10 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 12 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 13 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 14 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 15 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 16 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 17 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 18 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 19 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 20 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 21 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 22 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 23 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 24 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 25 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 26 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 27 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 28 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 29 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 30 | 2 | 2 | 2 | 6 |

Sumber data: Data Primer (hasil quisioner)

TABEL XIX DATA SCORE
TOTAL VARIABEL TERPENGARUH (Y)

| NO | VARIABEL (Y) | | TOTAL SCORE |
|----|--------------|----|-------------|
| | Y1 | Y2 | |
| 1 | 9 | 9 | 18 |
| 2 | 9 | 9 | 18 |
| 3 | 9 | 8 | 17 |
| 4 | 6 | 7 | 13 |
| 5 | 7 | 9 | 16 |
| 6 | 6 | 7 | 13 |
| 7 | 8 | 8 | 16 |
| 8 | 9 | 9 | 18 |
| 9 | 9 | 9 | 18 |
| 10 | 8 | 8 | 16 |
| 11 | 9 | 9 | 18 |
| 12 | 8 | 8 | 16 |
| 13 | 7 | 8 | 15 |
| 14 | 9 | 9 | 18 |
| 15 | 8 | 9 | 17 |
| 16 | 8 | 9 | 17 |
| 17 | 7 | 9 | 16 |
| 18 | 7 | 7 | 14 |
| 19 | 9 | 9 | 18 |
| 20 | 9 | 8 | 17 |
| 21 | 7 | 7 | 14 |
| 22 | 7 | 9 | 16 |
| 23 | 6 | 9 | 15 |
| 24 | 7 | 9 | 16 |
| 25 | 6 | 6 | 12 |
| 26 | 8 | 8 | 16 |
| 27 | 7 | 7 | 14 |
| 28 | 9 | 9 | 18 |
| 29 | 8 | 8 | 16 |
| 30 | 6 | 9 | 15 |



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah akhir dari suatu penelitian. Penelitian ini terdiri dari dua variabel, kedua variabel tersebut adalah variabel pengaruh (X) yaitu kemampuan aparat pemungut pajak di kecamatan Ringinrejo kabupaten Kediri dan variabel terpengaruh (Y) yaitu Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Ringinrejo kabupaten Kediri. Untuk melihat signifikansi dari kedua variabel tersebut dan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan, maka data yang diperoleh dilapangan baik itu data primer maupun data sekunder dianalisis. Pembuktian kebenaran hipotesis pada penelitian ini menggunakan korelasi rank Spearman yang menunjukkan ada atau tidaknya signifikansi antara Variabel X dan Variabel Y.

Adapun hasil analisis data dengan menggunakan Korelasi Rank Spearman adalah sebagai berikut :

1. Hasil yang didapatkan dari perhitungan Korelasi Rank spearman adalah sebesar 0,374 hasil ini lebih besar dari harga tabel kritis untuk $N = 30$ dengan taraf signifikansi 0,05 adalah 0,306. Maka kesimpulan yang didapat adalah "Ada hubungan yang positif antara Kemampuan aparat pemungut pajak dengan dengan efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Ringinrejo kabupaten Kediri".
2. Hasil yang didapat dari perhitungan "uji t" adalah sebesar 2,5 hasil ini lebih besar dari harga tabel kritis untuk $df = N - 2$ adalah 28 dengan taraf signifikansi 0,05 adalah 2,048. Maka kesimpulan yang didapat adalah "ada Hubungan yang significant antara Kemampuan aparat pemungut pajak dengan efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Ringinrejo kabupaten Kediri".

Berdasarkan perhitungan ini maka ketentuan yang berlaku dalam penggunaan hipotesis yang telah dirumuskan adalah :

“ Hipotesisi nol (H_0) ditolak dan Hipotesis Kerja (H_1) diterima”

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa :

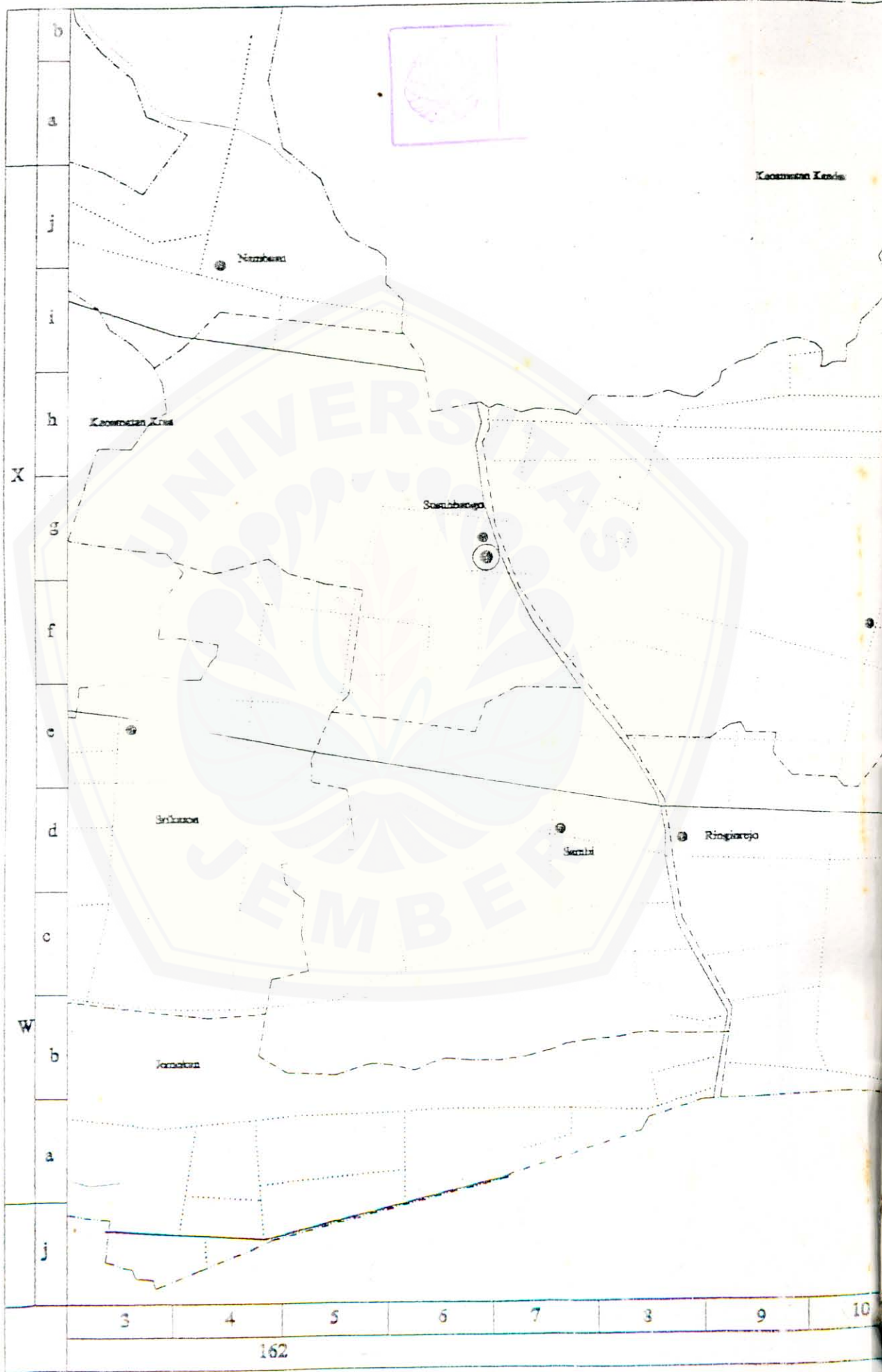
“Ada hubungan yang positif antara Kemampuan aparat pemungut pajak dengan efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Ringinrejo kabupaten Kediri”.

Berdasarkan kesimpulan diatas, ternyata efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang tinggi disebabkan oleh kemampuan aparat pemungut pajak yang tinggi pula.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data, penulis dapat memberikan masukan kepada pihak yang terkait, antara lain :

1. Untuk memperlancar pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, maka pembinaan maupun pelatihan terhadap petugas/aparat perlu ditingkatkan, karena merekalah yang berhadapan langsung dengan masyarakat wajib pajak pada umumnya.
2. Pihak yang terkait dengan kegiatan pemungutan pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang dalam hal ini adalah pemerintah kecamatan untuk lebih memperhatikan aparat pemungut, baik kesejahteraan yaitu melalui pemberian insentif secara teratur, kemampuan maupun kesulitan-kesulitan mereka dapat ter-akomodasi sehingga dapat mencapai tujuan bersama yaitu efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang sesuai dengan target yang telah ditentukan.
3. Untuk dapat mencapai keadilan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, maka usaha untuk memperoleh data yang obyektif mengenai obyek pajak perlu dilakukan secara insentif.



WILAYAH KERJA
KANTOR KECAMATAN



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PETA DASAR KECAMATAN RINGINREJO

Keterangan :

-  Kantor Kecamatan
-  Kantor Desa
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa
-  Jaringan Jalan
-  Jaringan Jalan Tanah
-  Sungai

KABUPATEN ELITAR



SKALA



1 2 3 4 5



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37, Telepon (0331) 337819, JEMBER 68121
E-mail : lemlit_unej @ jember. telkom.net.id

Nomor : 116/J.25.3.1/PL.5/2001
Lampiran : -
Perihal : *Permohonan ijin melaksanakan penelitian*

07 Februari 2001

Kepada Yth. Sdr. Kakan Kesatuan Bangsa
Pemda Kabupaten Tk. II Kediri
di -
KEDIRI.

Menunjuk surat pengantar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember No. 406/J.25.1.2/P.5/2001 Tanggal 07 Februari 2001, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama/NIM : DEDY AGUNG PRABOWO / 96-1007
Fakultas/jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Administrasi Negara
Alamat : Jl. Kalimantan X/111 Jember
Judul Penelitian : Hubungan Kemampuan Aparat Pemungut Pajak Dengan Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kec. Ringinrejo. Kab. Kediri
Lokasi : Kantor Kec. Ringinrejo Kab. Kediri.
Lama Penelitian : 3 (tiga) bulan

maka kami mohon dengan hormat bantuan serta pertolongan saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas

Demikian atas kerjasama dan bantuan saudara disampaikan terima kasih.



tu a,

T. Suikto, MSc.

031 131 022

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs.

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

BAKESBANG & LINMAS

JALAN SOEKARNO HATTA NOMOR 1 TELEPON 689969
KEDIRI

Kediri, 19 FEBRUARI 2001

Nomor : 072 / 02 / 3032 / 2001.
Lampiran :
Perihal : Penelitian / Survey / Research / KKN / PKL

Kepada
Yth. Sdr. CAMAT RINGINREJO
DI -
RINGINREJO

Menunjuk surat KETUA LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS JEMBER

Tanggal : 07 FEBRUARI 2001
Nomor : 116/J25.3.1/PL.5/2001

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : DEDY AGUNG PRABOWO
Alamat : JL . KALIMATAN X / III JEMBER
Pekerjaan : MHS FAK. ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIV. JEMBER
Kebangsaan : INDONESIA

Bermaksud mengadakan Penelitian " Survey / Research / KKN / PKL " :

Judul "HUBUNGAN KEMAMPUAN APARAT PEMUNGGIT PAJAK DENGAN EFEKTIVITAS PENERIMA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KEC. RINGINREJO.

Waktu : 3 (TIGA) BULAN TERHITUNG TGL. SURAT DIKELUARKAN
Lokasi : KECAMATAN RINGINREJO.
Peserta : -

Peneliti wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat dan setelah selesai diwajibkan memberikan laporan :

Demikian harap menjadikan maklum dan perhatian.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI



Pembusan :
Yth. 1. Sdr. KAPOLRES KEDIRI DI PARE;
2. Sdr. DAN DIM 0809 KEDIRI ;
3. Sdr. KETUA BAPPEDA KAB. KEDIRI;
4. Sdr. PEMBANTU BUPATI KEDIRI DI NGADILUWIH ;
5. Sdr. DEDY AGUNG PRABOWO (YBS)

PEMINTAH KABUPATEN KEDIRI

CAMAT RINGINREJO

Jl. CENDRAWASIH NOMOR : _____ TELEFON : 412444
RINGINREJO

SURAT KETERANGAN

No. : 070 / 88 / 421.106/2001

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DEDY AGUNG PRABOWO .
Tempat / tanggal lahir : Kediri, 1 Desember 1978 .
N I M : 96-1007 .
J u r u s a n : ADMINISTRASI NEGARA .

Telah mengadakan Penelitian di Kecamatan Ringinrejo Kab. Kediri dengan lama Penelitian 3 (tiga) bulan dengan Judul Skripsi :
" HUBUNGAN KEMAMPUAN APARAT PEMUNGUT PAJAK DENGAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN RINGINREJO KABUPATEN KEDIRI "

Demikian surat keterangan ini kami buat, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih .

Ringinrejo, 21 - 02 - 2001.

PEMERINTAH KABUPATEN RINGINREJO
CAMAT RINGINREJO
* KEDIRI *
SURIPTO UTOMO, BA.
Panata .
NIP. 010 063 745.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim , 1998. TAP MPR Nomor II Tahun 1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, Surakarta: PT. Pabelan
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arsjad, Nurjaman. Bambang Kusumanto. Yuwono Prawirosetoto.1992. *Keuangan Negara*. Jakarta: Itermedia.
- Djamaludin, M. Arief. 1997. "Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Negeri Tinjauan dari Segi Motivasi". Dalam jurnal Ilmu Pemerintahan (Edisi VI Oktober). Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif dan Aplikasi*. Malang: Erlangga
- Gellerman, Saul. W. 1994. *Motivasi dan Produktivitas*. Jakarta: LPPM
- Gibson. Ivancevich. Donnelly. 1997. *Organisasi : Perilaku, Struktur dan Proses*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Gomes, Faustino Cardoso. 1999. *Management Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta.: Andi Offset
- Harun. 1994. "Faktor-Faktor yang menghambat Pelaksanaan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan di Propinsi Lampung". Dalam Justitia No.8
- Hadi, Sutrisno. 1984. *Metode Research II*. Yogyakarta. Fakultas Psikologi UGM
- Handayaniingrat, Soewarno. 1998. *Pengantar Study Ilmu Administrasi Dan Management*. Jakarta: Gunung Agung

- Mannullang, M. 1987. *Dasar-Dasar Management*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Mardiasmo. 1995. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moenir, A>S. 1995. *Pendekatan Manusiawi dan Organisasi terhadap Pembinaan Kepegawaian*. Jakarta: Gunung Agung.
- Moeleong, MA, Lexy J. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Munawir dkk. 1990. *Perpajakan Untuk SMA*. Yogyakarta: BPPE
- Nasir, Muhammad. 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalai Indonesia
- Nitisemito, Alex S. 1980. *Management Personalia*, Jakarta: Ghalai Indonesia
- Ravianto, J. 1985. *Produktivitas dan Manusia Indonesia*. Jakarta: Lembaga Sarana Informasi Usaha dan Produktivitas
- Yusuf Suit, Almasdi. 1996. *Aspek Mental Dalam Management Sumber daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Shobarudin, M. Andy Fefta W. Dwi Atmanto. M. sapari. 1997. "Produktivitas Pelayanan Publik di Lembaga Pemerintah Desa". Dalam Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Vol. 9 Agustus). No. 2. Jakarta: Universitas Brawijaya. Hal 17-18
- Singarimbun, Masri, Sofyan Effendi. 1987. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3S
- Soemitro, Rochmat. 1997. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresco
- , 1986, *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung: Eresco
- Steers, M. Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga

- Sudjadi, F.X. 1987. *Aspek Manusia dalam Organisasi*, Jakarta: Erlangga
- Suprpto, J. 1998. *Metode Riset Dalam Aplikasinya Dalam Riset Pemasaran*. Jakarta: JP3es-UI
- Surachmad, Winarno. 1990. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: Alumni
- Sinungan, Muchdarsyah. 1997. *Produktivitas: Apa dan Bagaimana*. Jakarta: Bumi Aksara
- Timpe, A. Dale, 1991, *Memotivasi Pegawai*, Jakarta : Gramedia
- Robbins P. Stephen. 1996. *Perilaku Organisasi : Perilaku, struktur, Proses*, Jilid I. PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Undang-Undang No 5 Tahun 1974. 1983. *Pokok-pokok Pemerintahan Daerah*. Semarang: Aneka Ilmu
- Undang-Undang No 22 dan 25 Tahun 1999. *Otonomi Daerah*. Semarang: Aneka Ilmu

| df | Tingkat signifikansi untuk tes satu-sisi | | | | | |
|----------|--|-------|--------|--------|--------|---------|
| | .10 | .05 | .025 | .01 | .005 | .0005 |
| | Tingkat signifikansi untuk tes dua-sisi | | | | | |
| | .20 | .10 | .05 | .02 | .01 | .001 |
| 1 | 3.078 | 6.314 | 12.706 | 31.821 | 63.657 | 636.619 |
| 2 | 1.886 | 2.920 | 4.303 | 6.965 | 9.925 | 31.598 |
| 3 | 1.638 | 2.353 | 3.182 | 4.541 | 5.841 | 12.941 |
| 4 | 1.533 | 2.132 | 2.776 | 3.747 | 4.604 | 8.610 |
| 5 | 1.476 | 2.015 | 2.571 | 3.365 | 4.032 | 6.859 |
| 6 | 1.440 | 1.943 | 2.447 | 3.143 | 3.707 | 5.959 |
| 7 | 1.415 | 1.895 | 2.365 | 2.998 | 3.499 | 5.405 |
| 8 | 1.397 | 1.860 | 2.306 | 2.896 | 3.355 | 5.041 |
| 9 | 1.383 | 1.833 | 2.262 | 2.821 | 3.250 | 4.781 |
| 10 | 1.372 | 1.812 | 2.228 | 2.764 | 3.169 | 4.587 |
| 11 | 1.363 | 1.796 | 2.201 | 2.718 | 3.106 | 4.437 |
| 12 | 1.356 | 1.782 | 2.179 | 2.681 | 3.055 | 4.318 |
| 13 | 1.350 | 1.771 | 2.160 | 2.650 | 3.012 | 4.221 |
| 14 | 1.345 | 1.761 | 2.145 | 2.624 | 2.977 | 4.140 |
| 15 | 1.341 | 1.753 | 2.131 | 2.602 | 2.947 | 4.073 |
| 16 | 1.337 | 1.746 | 2.120 | 2.583 | 2.921 | 4.015 |
| 17 | 1.333 | 1.740 | 2.110 | 2.567 | 2.898 | 3.965 |
| 18 | 1.330 | 1.734 | 2.101 | 2.552 | 2.878 | 3.922 |
| 19 | 1.328 | 1.729 | 2.093 | 2.539 | 2.861 | 3.883 |
| 20 | 1.325 | 1.725 | 2.086 | 2.528 | 2.845 | 3.850 |
| 21 | 1.323 | 1.721 | 2.080 | 2.518 | 2.831 | 3.819 |
| 22 | 1.321 | 1.717 | 2.074 | 2.508 | 2.819 | 3.792 |
| 23 | 1.319 | 1.714 | 2.069 | 2.500 | 2.807 | 3.767 |
| 24 | 1.318 | 1.711 | 2.064 | 2.492 | 2.797 | 3.745 |
| 25 | 1.316 | 1.708 | 2.060 | 2.485 | 2.787 | 3.725 |
| 26 | 1.315 | 1.706 | 2.056 | 2.479 | 2.779 | 3.707 |
| 27 | 1.314 | 1.703 | 2.052 | 2.473 | 2.771 | 3.690 |
| 28 | 1.313 | 1.701 | 2.048 | 2.467 | 2.763 | 3.674 |
| 29 | 1.311 | 1.699 | 2.045 | 2.462 | 2.756 | 3.659 |
| 30 | 1.310 | 1.697 | 2.042 | 2.457 | 2.750 | 3.646 |
| 40 | 1.303 | 1.684 | 2.031 | 2.423 | 2.704 | 3.551 |
| 60 | 1.296 | 1.671 | 2.000 | 2.390 | 2.660 | 3.460 |
| 120 | 1.289 | 1.658 | 1.980 | 2.358 | 2.617 | 3.373 |
| ∞ | 1.282 | 1.645 | 1.960 | 2.326 | 2.576 | 3.291 |

^{*)} Tabel B diringkaskan dari Tabel III dalam Fisher dan Yates: *Statistical tables for biological, agricultural, and medical research*, diterbitkan oleh Oliver and Boyd Ltd. Edinburgh, dengan izin dari para penulis dan penerbit.

Tabel P. Tabel Harga-harga Kritis r_s Koefisien Korelasi Ranking Spearman*)

| N | Tingkat Signifikansi (tes satu-sisi) | |
|----|--------------------------------------|-------|
| | .05 | .01 |
| 4 | 1.000 | |
| 5 | .900 | 1.000 |
| 6 | .829 | .943 |
| 7 | .714 | .893 |
| 8 | .643 | .833 |
| 9 | .600 | .783 |
| 10 | .564 | .746 |
| 12 | .506 | .712 |
| 14 | .456 | .645 |
| 16 | .425 | .601 |
| 18 | .399 | .564 |
| 20 | .377 | .534 |
| 22 | .359 | .508 |
| 24 | .343 | .485 |
| 26 | .329 | .465 |
| 28 | .317 | .448 |
| 30 | .306 | .432 |

*) Disadur dari Olds, E.G 1938. *Distributions of Sums of squares of rank differences for small numbers of individuals*. Ann. Math. Statist, 9, 133 – 148, dan dari Olds, E.G, 1949 *The 5% significance levels for sum of squares of rank differences and a correction*. Ann. Math. Statist, 20, 117 – 118, dengan izin penulis dan penerbit.